# 2021 EDISI AGUSTUS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PPATK

BULETIN

# STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG &
PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

ISSN 89997

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

## DALAM BULLETIN INI, STATISTIK YANG DIHIMPUN MENCAKUP:

- Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, Profesi), serta Ditjen Bea Cukai
- Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik
- Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK

- Terkait fungsi analisis, selama Agustus 2021, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik, dengan dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah **TINDAK PIDANA KORUPSI** (15 HA/38,4%).

**30 HA**
HA reaktif
(permintaan dari penyidik)

**9 HA**
HA Proaktif
(inisiatif dari PPATK)

- Selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Agustus 2021, terdapat penambahan **2** Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum.

- Di tahun 2021, jumlah penyampaian laporan ke PPATK terus bertambah Pada Ags 2021 yakni:

1.816.021
LTKL

207.055
LTKT

7.844
LTKM

3.742
LTPBJ

- Dengan adanya penambahan laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK **selama tahun 2021 (s.d Agustus 2021)** telah mencapai **16.072.514** laporan.
- Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Agustus 2021 sebanyak **2.034.671** dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar **3%**.
- Kenaikan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKM sebesar **7,6%** dan LTKL sebesar **3,20%**.

- Untuk putusan pengadilan, hingga Agustus 2021 terdapat **632** putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal **penjara seumur hidup** dan denda maksimal **Rp32 Miliar**.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

**Jakarta, Oktober 2021**

**DIAN EDIANA RAE**
**Kepala PPATK**

# REKAPITULASI LAPORAN YANG DIKIRIMKAN KEPADA PPATK

**6** Jenis Laporan yang dikirimkan baik oleh Pihak Pelapor maupun Stakeholders APUPPT*)

### LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

- Pelaporan dimulai sejak Januari Tahun 2003.
- Dilaporkan oleh Pihak Pelapor yang terdiri dari: Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang & Jasa serta Profesi.

### LTKT - Laporan Transaksi Keuangan Tunai

- Pelaporan dimulai sejak Januari Tahun 2003.
- Dilaporkan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan.

### LPUT - Laporan Pembawaan Uang Tunai

- Pelaporan dimulai sejak Januari Tahun 2006.
- Dilaporkan oleh Staholders yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

### LTPBJ - Laporan Transaksi Penyedia Barang & Jasa

- Pelaporan dimulai sejak Mei Tahun 2012.
- Dilaporkan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Barang & Jasa.

### LTKL - Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari/Keluar Negeri

- Pelaporan dimulai sejak Januari Tahun 2014.
- Dilaporkan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan: Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

### LPT - Laporan Penundaan Transaksi

- Pelaporan dimulai sejak Januari Tahun 2013.
- Dilaporkan oleh Pihak Pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan.

*Catatan*:

*) Pihak Pelapor yang dimaksud sesuai tercantum pada Undang – Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010.

# REKAPITULASI LAPORAN YANG DIKIRIMKAN KEPADA PPATK

PERIODE

**2003 – 2010** *)

TOTAL

**4.365.138**

| LTKM | LTKT | LPUT |
|---|---|---|
| 57.134 | 4.302.293 | 5.711 |

PERIODE

**2011 – 2021** **)

TOTAL

**223.380.785**

| LTKM | LTKT | LPUT | LTPBJ | LTKL | LPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 557.337 | 26.187.728 | 21.826 | 330.019 | 196.280.698 | 3.177 |

*Catatan*:

*) Pelaporan berdasarkan periode 2003 s.d 2010 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003.

**) Pelaporan periode setelah 2010 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

RINGKASAN

# STATISTIK

## LAPORAN TRANSAKSI

| PERIODE 2021 | | PERIODE Agustus 2021 |
|---|---|---|
| 49.208 laporan | LTKM | 7.844 laporan |
| | ⬆ 7,6% m-to-m | |
| 1.809.382 laporan | LTKT | 207.055 laporan |
| | ⬆ 1% m-to-m | |
| 22.772 laporan | LTPBJ | 3.742 laporan |
| | ⬇ 8,1% m-to-m | |
| 29 lokasi pelaporan | LPUT | 29 lokasi pelaporan |
| 14.191.071 laporan | LTKL | 1.816.021 laporan |
| | ⬆ 3,2% m-to-m | |

RINGKASAN

# STATISTIK

## HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

| PERIODE 2021 | | PERIODE Agustus 2021 |
|---|---|---|
| 150 HA terkait 801 LTKM | HA PROAKTIF | 9 HA terkait 64 LTKM |
| 255 HA terkait 1.157 LTKM | HA INQUIRY | 30 HA terkait 80 LTKM |
| 170 IHA | IHA | 6 IHA |
| 69 HA terkait 120 LTKM | HA TPPT | 0 HA terkait 0 LTKM |
| 17 laporan | HP & IHP | 2 laporan |

# DAFTAR ISI


**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**RINGKASAN STATISTIK**

**SISTEM PELAPORAN GO AML**

**LAPORAN TRANSAKSI**

7 *LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)*

17 *LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)*

20 *LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)*

23 *LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)*

27 *LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)*

31 *LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)*

**ANALISIS DAN PEMERIKSAAN**

36 *HASIL ANALISIS (HA)*

39 *KARAKTERISTIK TERLAPOR HA*

41 *HA TERKAIT PENDANAAN TERORISME*

43 *HASIL PEMERIKSAAN (HP)*

45 *PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HASIL ANALISIS*

47 *PENGADUAN MASYARAKAT*



BULLETIN STATISTIK

ISSN : 89997

**Volume 132/THN XI/2021**



**LAIN - LAIN**

*PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU* 48

*KETERANGAN AHLI* 51

*AUDIT* 53

*PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU* 56

*NOTA KESEPAHAMAN (MOU)* 58

**ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG – UNDANG NO. 9 TAHUN 2013

# SISTEM PELAPORAN GOAML

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakterisitik pelaporan penyedia jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK telah mengadakan peluncuran atau go – *live* sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lain

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi

## GRIPS

- Satu laporan berisi satu transaksi dengan satu pihak terlapor serta satu jenis dugaan Tindak Pidana Asal (unutk LTKM)

**Perbedaan Signifikan**

## GOAML

- Laporan dapat berisi lebih dari satu transaksi, dengan lebih dari satu pihak terkait yang dilaporkan serta lebih dari satu dugaan Tindak Pidana Asal (untuk LTKM))

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LTKM

## LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

### UU TPPU
**Pasal (1) Ayat 5**

"Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana."

GOAML SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG

### Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

**Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) dan (2)**

1. "Dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:
   a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
   b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;:

**Teknis Pelaporan – Pasal 34 Ayat (1)**

"**PJK wajib mengisi laporan**:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;
d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK."

### Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

**Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)**

"PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:
b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan"

**Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)**

"**PBJ wajib mengisi laporan**:
b. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan
c. Aktivivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa."

### Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

**Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1)**

"Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK"

**Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1)**

"**Profesi wajib mengisi laporan**:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa."

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LTKM

## LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

**AGS 2021**

**Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor** kepada PPATK
**7.844 LTKM**

Rata-rata penerimaan
**392 laporan/hari**
(1 bulan = 20 hari)

Pelaporan LTKM bulan ini
**⬆ 7,6%**
Dibandingkan jumlah bulan Juli 2021 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini
**⬆58,2%**
Dibandingkan jumlah bulan Ags 2020 (y-to-y)

Total LTKM yang diterima PPATK dari **2003 hingga Ags 2021**
**621.261 LTKM**

Indikasi Tindak Pidana mayoritas **pada Ags 2021**: **Penipuan**
**32,0%**

Mayoritas TKM **pada Ags** 2021 terjadi di

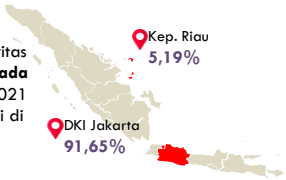


**Tabel 1**

**Resume Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pihak Pelapor per Bulan**

| Laporan | Jan**) | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme | | 14 | 48 | 75 | 21 | 15 | 42 | 29 |
| LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme | | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | | 3.834 | 5.704 | 5.080 | 4.033 | 5.149 | 6.896 | 7.308 |
| LTKM - Atas Permintaan PPATK | | 1.000 | 792 | 703 | 420 | 472 | 268 | 416 |
| Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha | | 119 | 165 | 92 | 122 | 108 | 85 | 89 |
| **Total** | **6.081** | **4.968** | **6.718** | **5.961** | **4.597** | **5.746** | **7.293** | **7.844** |

*Catatan*:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Perka PPATK No 1 Tahun 2021

**) Klasifikasi LTKM dimulai saat berlakunya sistem pelaporan GoAML sehingga pada Bulan Januari 2021 disajikan data akumulatif

**Grafik 1**
**Distribusi Jumlah LTKM Kumulatif per Kelompok Pihak Pelapor Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

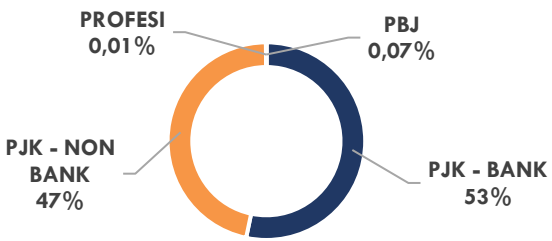


**Grafik 2**
**Distribusi Jumlah Pihak Pelapor per Kelompok Pihak Pelapor Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

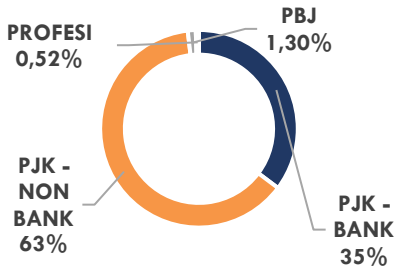

**Tabel 2**

**Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri**

| Kelompok Industri*) | Laporan | | | | Pihak Pelapor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | Jan 2003 s.d. Ags 2021 | Tahun 2021 (s.d Ags 2021) |
| | Jan - Ags | Total 2020 | Jan - Ags | | |
| **PJK - BANK** | **26.058** | **38.616** | **26.225** | **328.347** | **136** |
| **Bank Umum** | **25.850** | **38.306** | **26.057** | **323.909** | **110** |
| Bank Asing | 827 | 1.159 | 756 | 10.407 | 12 |
| Bank Campuran | 148 | 297 | 273 | 5.269 | 7 |
| Bank Milik Negara | 5.644 | 8.090 | 4.024 | 106.661 | 4 |
| Bank Pembangunan Daerah | 950 | 1.566 | 615 | 24.406 | 31 |
| Bank Swasta | 18.281 | 27.194 | 20.389 | 177.166 | 56 |
| **Bank Perkreditan Rakyat** | **208** | **310** | **168** | **4.438** | **26** |
| **PJK - NON BANK** | **18.231** | **29.441** | **22.946** | **292.877** | **243** |
| • Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 17 | 20 | 21 | 107 | 3 |
| • Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam | 15 | 21 | 9 | 324 | 1 |
| • Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga Keuangan Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga Pembiayaan Ekspor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| • Manajer Investasi | 0 | 0 | 77 | 77 | 3 |
| • Pasar Modal**) | 1.035 | 1.886 | 247 | 11.398 | 0 |
| • Pedagang Valuta Asing | 8.863 | 13.269 | 6.690 | 133.718 | 88 |
| • Pegadaian | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 |
| • Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 157 | 238 | 734 | 1.046 | 7 |
| • Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 4.871 | 8.464 | 6.907 | 38.895 | 43 |
| • Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 1.966 | 3.532 | 6.355 | 45.360 | 35 |
| • Perusahaan Efek | 0 | 0 | 264 | 264 | 18 |
| • Perusahaan Modal Ventura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| • Perusahaan Pembiayaan | 1.118 | 1.657 | 987 | 58.247 | 34 |
| • Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 189 | 354 | 620 | 3.401 | 10 |
| • Wali Amanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PBJ***) | **0** | **0** | **34** | **34** | **5** |
| **PROFESI***) | **0** | **0** | **3** | **3** | **2** |
| **Total** | **44.289** | **68.057** | **49.208** | **621.261** | **386** |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

***) Diinformasikan pada bulan Agustus 2021, terdapat pelaporan LTKM dari Balai Lelang sejumlah 28 laporan, Pedagang Kendaraan Bermotor sejumlah 1 dan Notaris sejumlah 1 laporan serta LTKM – Atas Permintaan PPATK Perusahaan Properti/Agen Properti sejumlah 2 laporan

**Tabel 3**

**Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan**

| Kelompok Industri*) | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| **PJK - BANK** | **32.857** | **40.206** | **2.936** | **3.111** | **3.010** | **3.401** | **3.036** | **3.392** | **2.855** | **3.896** | **3.412** | **2.605** | **3.295** | **3.145** | **3.625** |
| **Bank Umum** | **32.190** | **39.537** | **2.914** | **3.085** | **2.984** | **3.372** | **3.015** | **3.382** | **2.832** | **3.879** | **3.389** | **2.585** | **3.276** | **3.131** | **3.583** |
| Bank Asing | 1.114 | 1.265 | 102 | 79 | 78 | 86 | 89 | 135 | 72 | 214 | 130 | 51 | 50 | 44 | 60 |
| Bank Campuran | 394 | 306 | 20 | 41 | 22 | 47 | 39 | 58 | 27 | 20 | 25 | 20 | 33 | 44 | 46 |
| Bank Milik Negara | 9.183 | 14.195 | 440 | 443 | 531 | 779 | 693 | 359 | 429 | 612 | 440 | 419 | 710 | 512 | 543 |
| Bank Pembangunan Daerah | 2.202 | 1.810 | 123 | 117 | 73 | 105 | 321 | 211 | 75 | 75 | 66 | 32 | 80 | 46 | 30 |
| Bank Swasta | 19.297 | 21.961 | 2.229 | 2.405 | 2.280 | 2.355 | 1.873 | 2.619 | 2.229 | 2.958 | 2.728 | 2.063 | 2.403 | 2.485 | 2.904 |
| **Bank Perkreditan Rakyat** | **667** | **669** | **22** | **26** | **26** | **29** | **21** | **10** | **23** | **17** | **23** | **20** | **19** | **14** | **42** |
| **PJK - NON BANK** | **34.227** | **38.381** | **2.021** | **2.502** | **2.542** | **2.986** | **3.180** | **2.689** | **2.113** | **2.819** | **2.549** | **1.992** | **2.449** | **4.148** | **4.187** |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 11 | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam | 34 | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga Keuangan Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajer Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Pasar Modal**) | 1.574 | 1.820 | 257 | 227 | 266 | 269 | 89 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagang Valuta Asing | 20.835 | 22.455 | 801 | 987 | 1.202 | 1.052 | 1.165 | 771 | 715 | 1.191 | 996 | 712 | 969 | 671 | 665 |
| Pegadaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 5 | 58 | 17 | 22 | 20 | 17 | 22 | 6 | 300 | 359 | 10 | 25 | 13 | 12 | 9 |
| Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 3.802 | 6.552 | 670 | 844 | 692 | 980 | 1.077 | 1.249 | 717 | 781 | 1.118 | 860 | 1.007 | 500 | 675 |
| Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 3.578 | 3.363 | 154 | 228 | 224 | 503 | 611 | 182 | 143 | 214 | 192 | 237 | 233 | 2.745 | 2.409 |
| Perusahaan Efek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 47 | 22 | 47 | 31 | 62 |
| Perusahaan Modal Ventura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan Pembiayaan | 3.977 | 3.765 | 79 | 173 | 116 | 106 | 144 | 144 | 149 | 136 | 134 | 78 | 131 | 115 | 100 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 410 | 155 | 38 | 19 | 19 | 57 | 70 | 90 | 67 | 37 | 32 | 49 | 45 | 62 | 238 |
| Wali Amanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PBJ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| **PROFESI** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Total** | **67.084** | **78.587** | **4.957** | **5.613** | **5.552** | **6.387** | **6.216** | **6.081** | **4.968** | **6.718** | **5.961** | **4.597** | **5.746** | **7.293** | **7.844** |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Grafik 3**
**Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per bulan dalam 1 tahun terakhir Ags 2020 s.d Ags 2021**

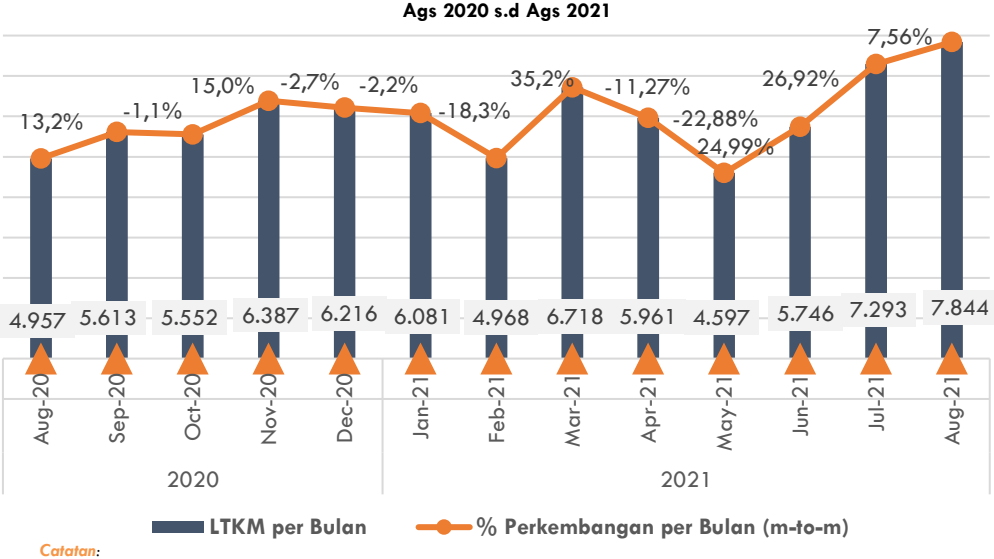


*Catatan:*
*month to month (m-to-m)* : perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

**Grafik 4**
**Perkembangan Penerimaan Jumlah LTKM per tahun dalam 3 tahun terakhir 2018 s.d 2020**

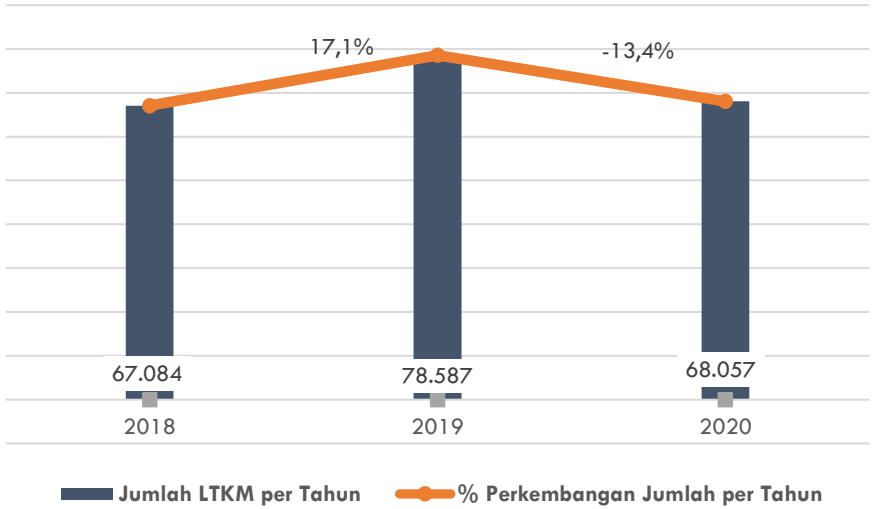


*Catatan:*
- Pekembangan Jumlah per Tahun: perbandingan jumlah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya

**Grafik 5**
**Perkembangan Kumulatif LTKM**
**dalam 4 tahun terakhir**
**2018 s.d. Ags 2021**

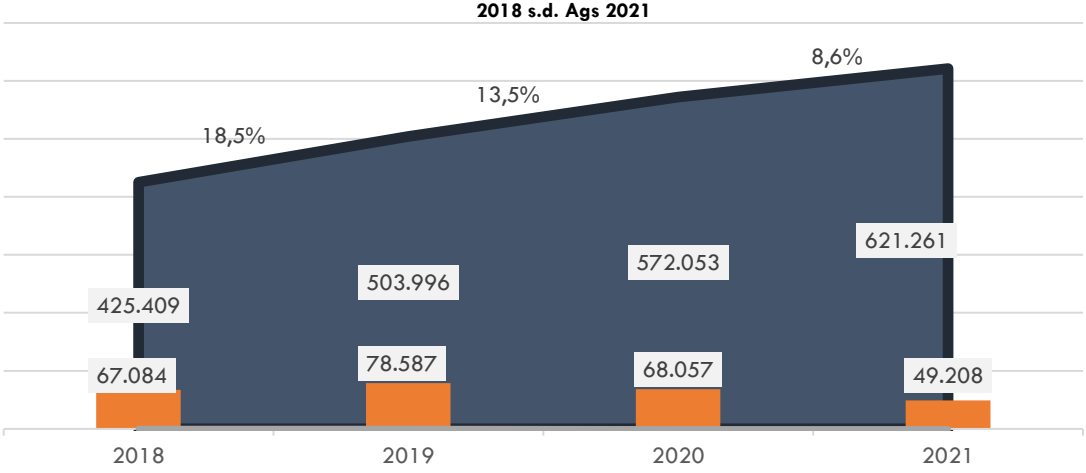


*Catatan*:
- *cumulative to* cumulative (c-to-c): perbandingan jumlah kumulatif antar waktu tertentu
- Jumlah terhimpun dari Januari 2003
- Pada tahun 2021, data yang terakumulasi hanya sampai Agustus 2021

**Grafik 6**
**Penerimaan Rata – Rata per bulan LTKM**
**Selama 4 tahun terakhir**
**2018 s.d Ags 2021**

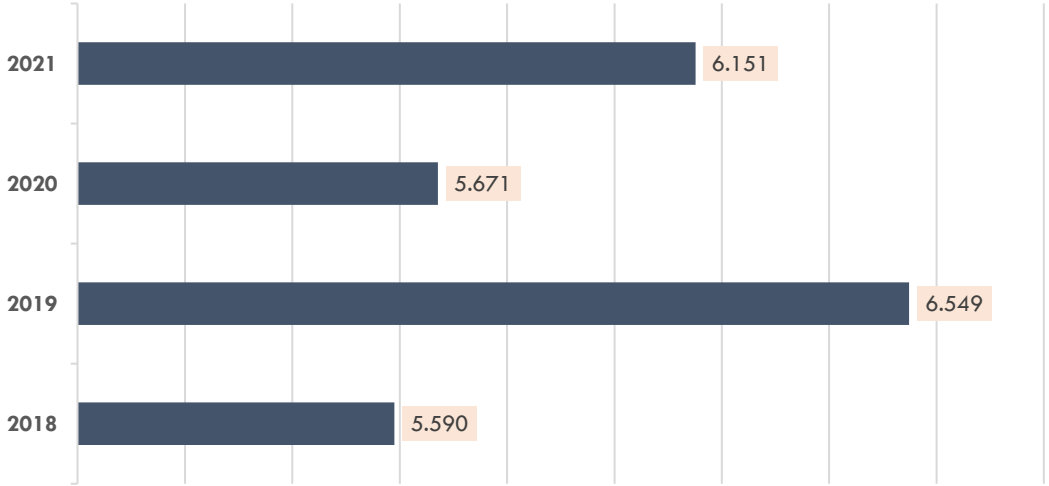

**Grafik 7**
**Jumlah LTKM berdasarkan Jenis Pihak Pelapor diterima selama 4 tahun terakhir**
**2018 s.d Ags 2021**

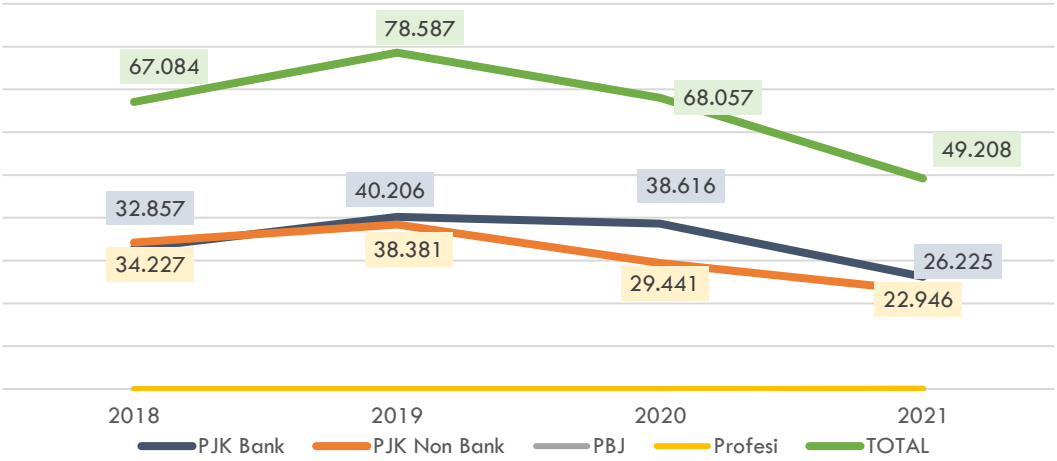


## INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilih **INDIKATOR** dengan kode:

a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010
b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa
c. HINDAR : Menghindari Pelaporan
d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana
e. MINTA : Permintaan PPATK
f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha
g. CBCC : LPUTLB
h. TUNDA : Penundanaan Transaksi
i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme
j. LT : Indikator LT
k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus
l. INQUIRY : Permintaan Apgakum
m. HENTI : Penghentian Transaksi
n. KOREKSI : Koreksi Laporan

- Sesuai dengan Lampiran Perka PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untuk **pilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu).**
- Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak ada indikator INDTPA.

Dengan demikian, *dimungkinkan* terjadi **perbedaan jumlah LTKM per TPA** dengan **LTKM berdasarkan parameter lainnya.**

## Tabel 4
## Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Indikator Tindak Pidana Asal per Bulan

| Tindak Pidana Asal*) | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| • Cukai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 5 | 25 | 15 | 9 | 15 |
| • Di Bidang Kehutanan | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| • Di Bidang Kelautan dan Perikanan | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| • Di Bidang Lingkungan Hidup | 45 | 71 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 31 | 10 |
| • Di Bidang Pasar Modal | 27 | 52 | 55 | 19 | 39 | 77 | 27 | 21 | 48 | 119 | 61 | 70 | 130 | 90 | 152 |
| • Di Bidang Perasuransian | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 49 | 43 | 38 | 68 | 67 | 126 |
| • Di Bidang Perbankan | 902 | 571 | 36 | 11 | 49 | 27 | 55 | 25 | 217 | 291 | 305 | 208 | 267 | 223 | 261 |
| • Di Bidang Perpajakan | 1.124 | 1.481 | 186 | 122 | 127 | 165 | 125 | 133 | 338 | 522 | 338 | 211 | 292 | 336 | 372 |
| • Kepabeanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 6 | 6 | 14 | 13 | 22 |
| • Korupsi | 4.360 | 4.580 | 259 | 249 | 277 | 498 | 303 | 148 | 654 | 477 | 482 | 253 | 299 | 594 | 493 |
| • Narkotika | 2.773 | 1.257 | 115 | 156 | 126 | 44 | 161 | 78 | 216 | 280 | 212 | 63 | 95 | 185 | 141 |
| • Pemalsuan Uang | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| • Penculikan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| • Pencurian | 38 | 67 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20 | 4 | 1 | 6 | 19 | 6 |
| • Penggelapan | 481 | 959 | 24 | 31 | 57 | 158 | 49 | 34 | 166 | 262 | 160 | 211 | 255 | 1.779 | 1.791 |
| • Penipuan | 7.899 | 9.801 | 1.117 | 1.286 | 1.125 | 1.165 | 866 | 1.265 | 1.300 | 2.367 | 2.005 | 1.745 | 2.080 | 2.264 | 2.608 |
| • Penyelundupan Migran | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| • Penyelundupan Tenaga Kerja | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| • Penyelundupan Barang | 32 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyuapan | 730 | 686 | 31 | 37 | 53 | 41 | 50 | 27 | 50 | 124 | 90 | 110 | 192 | 694 | 763 |
| • Perdagangan Orang | 8 | 274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 161 | 12 | 12 | 5 |
| • Perdagangan Senjata Gelap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| • Perjudian | 1.345 | 2.907 | 62 | 113 | 99 | 72 | 55 | 208 | 133 | 246 | 294 | 96 | 196 | 317 | 375 |
| • Prostitusi | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 |
| • Psikotropika | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| • Terorisme | 840 | 660 | 132 | 74 | 129 | 26 | 68 | 106 | 98 | 152 | 112 | 32 | 127 | 73 | 61 |
| • Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun | 973 | 818 | 56 | 49 | 69 | 58 | 58 | 29 | 1.271 | 1.820 | 1.813 | 1.246 | 1.486 | 891 | 933 |
| • Tidak teridentifikasi | 45.385 | 54.299 | 2.867 | 3.453 | 3.391 | 4.046 | 4.391 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **67.084** | **78.587** | **4.957** | **5.613** | **5.552** | **6.387** | **6.216** | **6.081** | **4.620** | **6.873** | **5.970** | **4.529** | **5.573** | **7.621** | **8.162** |

*Catatan*:

*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**Tabel 5**

**Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi per Bulan**

| Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| Aceh | 482 | 561 | 31 | 26 | 34 | 23 | 53 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Sumatera Utara | 2.010 | 2.619 | 230 | 297 | 241 | 270 | 236 | 281 | 9 | 18 | 11 | 9 | 19 | 18 | 16 |
| Sumatera Barat | 247 | 374 | 11 | 12 | 16 | 23 | 12 | 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Sumatera Selatan | 848 | 1.338 | 86 | 169 | 142 | 167 | 148 | 163 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| Bengkulu | 75 | 105 | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jambi | 336 | 413 | 33 | 25 | 46 | 24 | 116 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Riau | 640 | 675 | 37 | 38 | 94 | 80 | 64 | 42 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Kepulauan Riau | 3.019 | 4.637 | 435 | 608 | 878 | 947 | 1.197 | 840 | 928 | 1.119 | 1079 | 820 | 1064 | 556 | 407 |
| Lampung | 941 | 974 | 34 | 60 | 51 | 64 | 53 | 57 | 16 | 7 | 11 | 14 | 13 | 17 | 38 |
| Kep Bangka Belitung | 113 | 158 | 8 | 19 | 9 | 9 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Banten | 2.270 | 2.896 | 137 | 229 | 204 | 184 | 193 | 249 | 53 | 19 | 23 | 18 | 29 | 53 | 30 |
| DKI Jakarta | 32.967 | 37.173 | 2.633 | 2.614 | 2.374 | 3.097 | 2.781 | 2.628 | 3.753 | 5.352 | 4616 | 3557 | 4399 | 6501 | 7189 |
| Jawa Barat | 10.960 | 9.439 | 506 | 547 | 535 | 501 | 457 | 590 | 108 | 111 | 128 | 64 | 90 | 52 | 93 |
| Jawa Tengah | 1.930 | 2.328 | 135 | 145 | 159 | 161 | 145 | 188 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Jawa Timur | 4.651 | 5.124 | 265 | 321 | 260 | 284 | 234 | 265 | 21 | 25 | 9 | 26 | 32 | 9 | 18 |
| DI Yogyakarta | 518 | 573 | 27 | 32 | 29 | 30 | 46 | 48 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bali | 587 | 870 | 32 | 41 | 62 | 65 | 62 | 108 | 16 | 7 | 14 | 44 | 12 | 9 | 10 |
| Nusa Tenggara Barat | 283 | 337 | 4 | 11 | 16 | 22 | 15 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nusa Tenggara Timur | 90 | 132 | 13 | 4 | 2 | 9 | 4 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Maluku | 72 | 174 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maluku Utara | 59 | 74 | 3 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Barat | 359 | 1.161 | 52 | 52 | 38 | 55 | 28 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Kalimantan Timur | 683 | 1.754 | 80 | 103 | 140 | 89 | 66 | 103 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Kalimantan Tengah | 155 | 404 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| Kalimantan Selatan | 264 | 836 | 13 | 43 | 26 | 28 | 51 | 43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 |
| Kalimantan Utara | 24 | 153 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Utara | 292 | 382 | 8 | 17 | 11 | 17 | 18 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sulawesi Selatan | 1.021 | 1.615 | 62 | 69 | 57 | 100 | 93 | 84 | 16 | 7 | 15 | 9 | 11 | 3 | 4 |
| Sulawesi Tengah | 296 | 455 | 8 | 32 | 24 | 55 | 56 | 53 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 259 | 195 | 13 | 16 | 17 | 27 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Barat | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorontalo | 80 | 70 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 490 | 465 | 27 | 36 | 41 | 18 | 20 | 58 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1 | 4 |
| Papua Barat | 55 | 104 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **67.084** | **78.587** | **4.957** | **5.613** | **5.552** | **6.387** | **6.216** | **6.081** | **4.968** | **6.718** | **5.961** | **4.597** | **5.746** | **7.293** | **7.844** |

**Grafik 8**

**Persentase Distribusi LTKM per TPA**
**Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

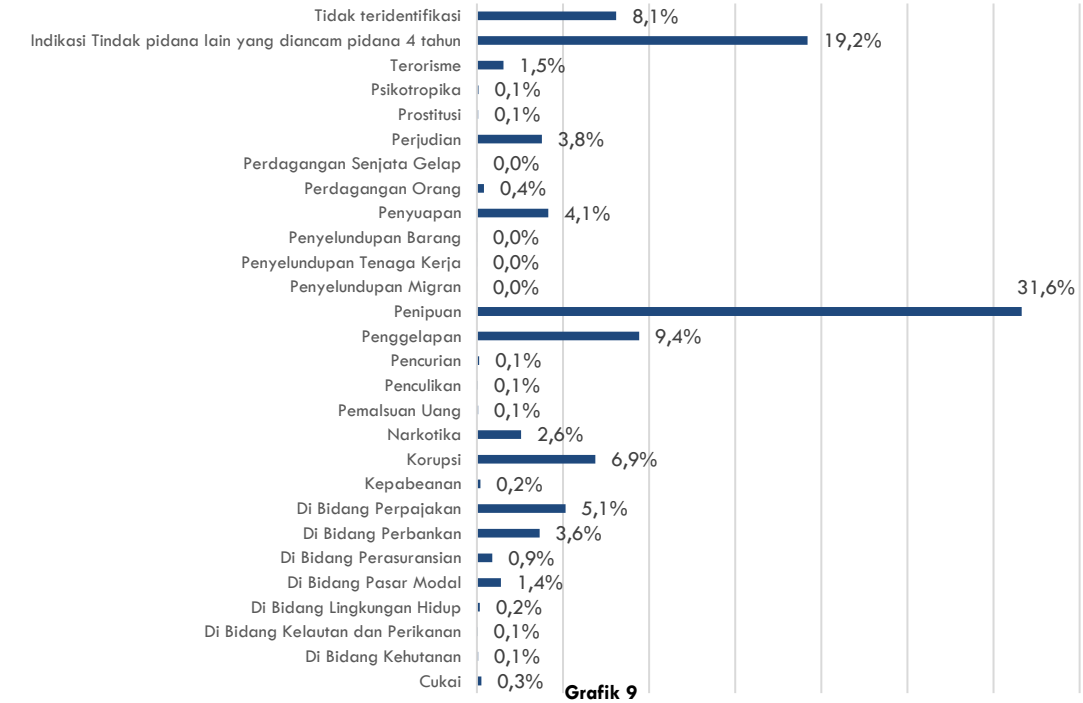


**Grafik 9**

**Persentase Distribusi LTKM per Provinsi**
**Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

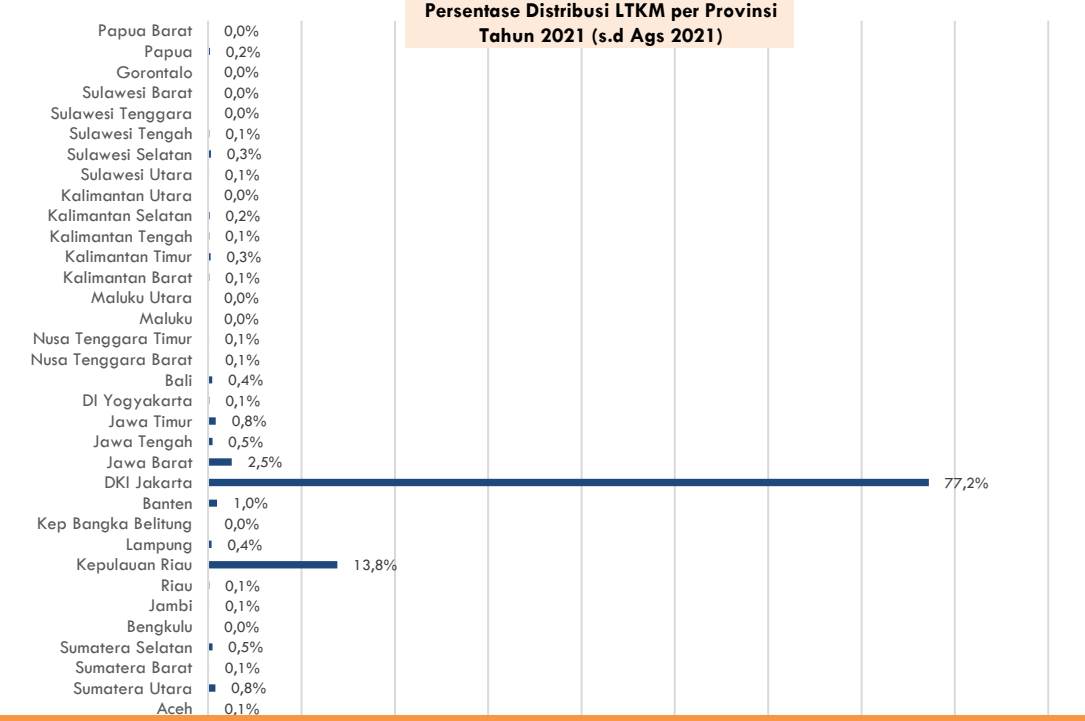

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LTKT

## LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

**UU TPPU**

Pasal 1 angka 6

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

**AGS 2021**

**207.055 LTKT**

**yang disampaikan kepada PPATK**

1% ↑ Dibandingkan jumlah bulan **Juli 2021 (m-to-m)**

6% ↓ Dibandingkan jumlah bulan **Ags 2020 (y-on-y)**

GOAML SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG

Pasal 9 huruf f menyatakan "**Penyedia Jasa Keuangan** wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari Kerja."

**1.809.382 LTKT**

**yang disampaikan kepada PPATK selama tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

**34,9 Juta LTKT**

**yang disampaikan kepada PPATK sejak tahun 2003 s.d 2021 (s.d Ags 2021)**

*Catatan*:
Data LTKT yang disajikan merupakan pelaporan kas masuk dan kas keluar

**Pihak Pelapor LTKT selama tahun 2021**

**372** Bank

**127** Non-Bank

**Tabel 6**

**Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan**

| Kelompok Industri*) | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| **Bank** | **3.161.332** | **3.096.589** | **216.845** | **244.028** | **221.312** | **251.269** | **257.307** | **327.730** | **147.189** | **240.930** | **220.892** | **212.024** | **235.548** | **202.490** | **205.065** |
| • Bank Umum | 3.139.581 | 3.091.514 | 216.566 | 243.615 | 220.988 | 250.887 | 256.893 | 327.363 | 146.968 | 240.567 | 220544 | 211707 | 235233 | 202201 | 204692 |
| • Bank Perkreditan Rakyat | 21.751 | 5.075 | 279 | 413 | 324 | 382 | 414 | 367 | 221 | 363 | 348 | 317 | 315 | 289 | 373 |
| **Non-Bank** | **22.821** | **33.434** | **3.205** | **4.096** | **3.219** | **3.988** | **4.113** | **2.910** | **1.439** | **2.673** | **2.309** | **2.068** | **2.267** | **1.858** | **1.990** |
| • Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam | 0 | 0 | 24 | 33 | 21 | 44 | 35 | 15 | 21 | 67 | 89 | 55 | 76 | 37 | 41 |
| • Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga keuangan mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga pembiayaan ekspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Manajer Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pasar Modal**) | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pedagang Valuta Asing | 19.455 | 24.593 | 2.705 | 2.498 | 2.487 | 2.439 | 2.737 | 2.215 | 878 | 2.041 | 1771 | 1644 | 1852 | 1529 | 1637 |
| • Pegadaian | 0 | 0 | 307 | 323 | 205 | 249 | 214 | 323 | 138 | 432 | 336 | 314 | 256 | 201 | 252 |
| • Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang | 3.168 | 8.800 | 169 | 1.238 | 502 | 1.251 | 1.120 | 356 | 394 | 130 | 111 | 52 | 76 | 74 | 41 |
| • Perposan sebagai penyelenggara jasa giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Efek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| • Perusahaan modal ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Pembiayaan | 18 | 21 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| • Perusahaan pembiayaan infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Wali Amanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **3.184.153** | **3.130.023** | **220.050** | **248.124** | **224.531** | **255.257** | **261.420** | **330.640** | **148.628** | **243.603** | **223.201** | **214.092** | **237.815** | **204.348** | **207.055** |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Tabel 7**

**Jumlah Pihak Pelapor LTKT Tahun 2021 (s.d Agustus 2021)**

| Kelompok Industri*) | Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2021 (s.d Agustus 2021) |
|---|---|
| **Bank** | **372** |
| • Bank Umum | 107 |
| • Bank Perkreditan Rakyat | 265 |
| **Non-Bank** | **127** |
| • Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 0 |
| • Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam | 3 |
| • Kustodian | 0 |
| • Lembaga keuangan mikro | 0 |
| • Lembaga pembiayaan ekspor | 0 |
| • Manajer Investasi | 0 |
| • Pasar Modal**) | 0 |
| • Pedagang Valuta Asing | 98 |
| • Pegadaian | 1 |
| • Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 |
| • Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet | 0 |
| • Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang | 19 |
| • Perposan sebagai penyelenggara jasa giro | 0 |
| • Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 0 |
| • Perusahaan Efek | 2 |
| • Perusahaan modal ventura | 0 |
| • Perusahaan Pembiayaan | 4 |
| • Perusahaan pembiayaan infrastruktur | 0 |
| • Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi | 0 |
| • Wali Amanat | 0 |
| • Pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan lain | 0 |
| **Total** | **499** |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Grafik 10**

**Perkembangan Jumlah LTKT yang Diterima oleh PPATK dalam 1 tahun terkahir**

**Agustus 2020 s.d Agustus 2021**

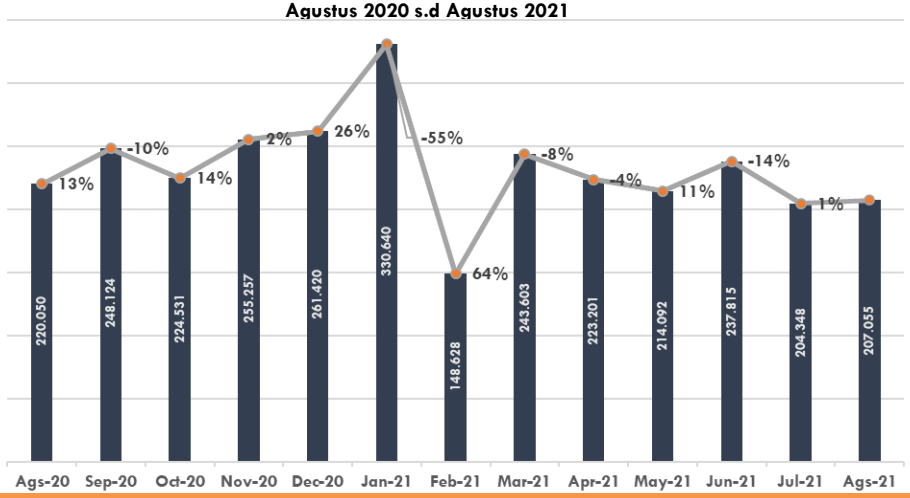

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

# LPUT

## LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI

**UU TPPU**

### Pasal 34 Ayat 1

"Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

### Pasal 35 Ayat 1

"Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

### Laporan Pembawaan Uang Tunai

Selama **Agustus 2021**, tidak terdapat LPUT yang disampaikan **Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI (DJBC)** kepada PPATK

Jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 hingga **Agustus 2021** tercatat sebanyak **27.537** laporan

29 lokasi pelaporan

Laporan terbanyak :

- Soekarno-Hatta
- Batam

### Laporan Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Dari Januari 2006 hingga **Agustus 2021**, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari **DJBC** sebanyak **516** pelanggaran.

### Laporan Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan

Dari Januari 2006 hingga **Agustus 2021**, PPATK juga menerima **21** laporan pembawaan uang tunai mencurigakan yang terjadi di **Soekarno Hatta**.

**Tabel 8**

**Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan (s.d Agustus 2021)***

| Lokasi Pelaporan | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| Batam | 2 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soekarno Hatta | 34 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanjung Balai Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tj. Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngurah Rai Denpasar | 249 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teluk Bayur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teluk Nibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pontianak | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekanbaru | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semarang (Tj. Emas) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lombok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palembang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yogyakarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entikong | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuala Namu | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juanda | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atambua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunukan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makassar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sintete | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banda Aceh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **317** | **4.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Catatan*:

*) Terdapat *update* data statistik LPUT per 31 Agustus 2021 sesuai dengan pelaporan dari DJBC

**Grafik 11**

**Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan selama 4 tahun terakhir 2018 s.d Ags 2021**

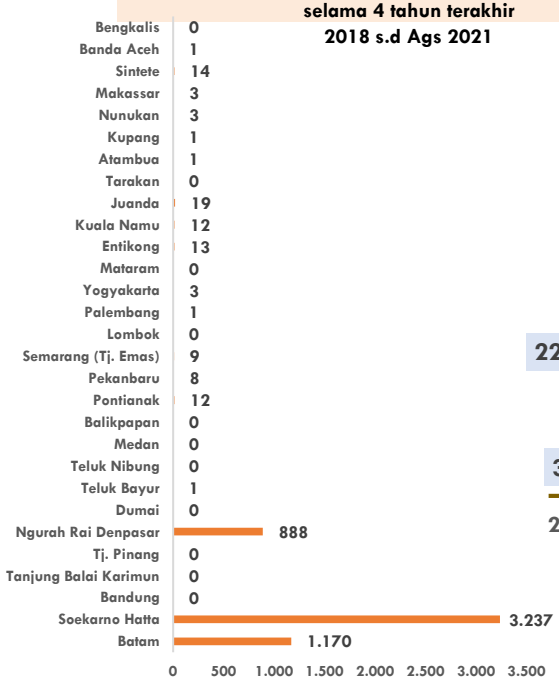


**Grafik 12**

**Perkembangan Jumlah Per Tahun dan Kumulatif LPUT (2018 – 2021 (s.d Ags 2021)**

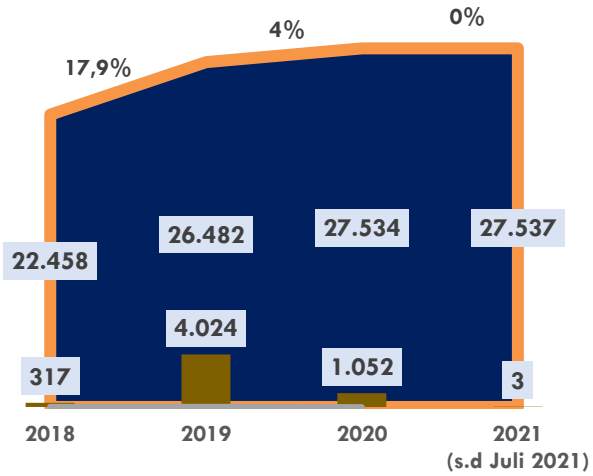

**Tabel 9**

**Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan**

| Lokasi Pelaporan | Jumlah Jan 2006 s.d. Ags 2021 | (%) |
|---|---|---|
| Ngurah Rai Denpasar | 258 | 50,0% |
| Soekarno Hatta | 68 | 13,2% |
| Batam | 49 | 9,5% |
| Kuala Namu | 66 | 12,8% |
| Pekan Baru | 15 | 2,9% |
| Pontianak | 8 | 1,6% |
| Medan | 6 | 1,2% |
| Tarakan | 4 | 0,8% |
| Dumai | 3 | 0,6% |
| Bandung | 3 | 0,6% |
| Tj. Pinang | 2 | 0,4% |
| Teluk Bayur | 4 | 0,8% |
| Tj. Balai Karimun | 3 | 0,6% |
| Halim Perdana Kusumah | 1 | 0,2% |
| Teluk Nibung | 1 | 0,2% |
| Juanda | 1 | 0,2% |
| Mataram | 1 | 0,2% |
| Palembang | 2 | 0,4% |
| Atambua | 6 | 1,2% |
| Bengkalis | 2 | 0,4% |
| Tj. Emas | 1 | 0,2% |
| Sintete | 1 | 0,2% |
| Entikong | 11 | 2,1% |
| **Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai** | **516** | **100%** |

**Grafik 13**

**Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan**

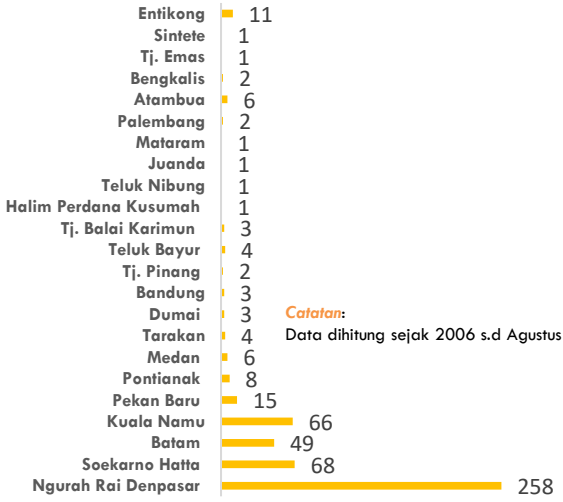

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LTPBJ

## LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA

### UU TPPU

**Pasal 17 ayat (1)**

"Pihak Pelapor meliputi:

**a. penyedia jasa keuangan:**

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

**b. penyedia barang dan/atau jasa lain:**

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang."

Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012

**AGS 2021**

**Jumlah LTPBJ** yang disampaikan **pada Ags 2021**

**3.742 Laporan**

**Jumlah PBJ Pelapor** kepada PPATK dari 2012 **hingga Ags 2021**

**1009 Pihak Pelapor**

Pelaporan LTPBJ **Ags 2021**

⬇ **8,1%**

Dibandingkan jumlah bulan Juli 2021 (m-to-m)

Pelaporan LTPBJ **Ags 2021**

⬆ **42,1%**

Dibandingkan jumlah bulan Ags 2020 (y-to-y)

Pada Tahun 2021 (**s.d Ags 2021**), laporan Transaksi dari PBJ diterima dari:

**8.681** laporan
**(38,1%)**
Perusahaan Properti

**8.908** laporan
**(39,1%)**
Pedagang Kendaraan Bermotor

**3.829** laporan
**(16,8%)**
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia

**1.354** laporan
**(5,9%)**
Balai Lelang

**0** laporan
**(0%)**
Pedagang Barang Seni/Antik

GOAML SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG

### Perka PPATK No 2 Tahun 2021

**Pasal 2 Ayat (1))**

"PBJ wajib menyampaikan ke PPATK laporan:

a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);"

**Tabel 10**

**Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan**

| Kelompok Industri | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| Perusahaan Properti | 26.949 | 16.436 | 1.110 | 1.233 | 1.078 | 1.397 | 1.449 | 1.085 | 351 | 594 | 1.317 | 1.541 | 1.258 | 1.433 | 1.102 |
| Pedagang Kendaraan Bermotor | 17.566 | 18.593 | 988 | 1.334 | 732 | 1.896 | 1.521 | 902 | 739 | 1.092 | 812 | 1.296 | 966 | 1.588 | 1.513 |
| Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 899 | 3.114 | 475 | 367 | 310 | 349 | 316 | 417 | 100 | 173 | 209 | 458 | 544 | 913 | 1.015 |
| Balai Lelang | 769 | 975 | 61 | 129 | 109 | 143 | 356 | 134 | 62 | 89 | 461 | 152 | 208 | 136 | 112 |
| Barang Seni/Antik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidak terklasifikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **46.183** | **39.118** | **2.634** | **3.063** | **2.229** | **3.785** | **3.642** | **2.538** | **1.252** | **1.948** | **2.799** | **3.447** | **2.976** | **4.070** | **3.742** |

**Tabel 11**

**Jumlah Kumulatif Laporan & Pihak Pelapor per Kelompok Industri**

| Kelompok Industri | Laporan | | Pihak Pelapor |
|---|---|---|---|
| | Mei 2012 s.d Ags 2021 | 2021 s.d. Ags 2021 | Mei 2012 s.d Ags 2021 |
| • Perusahaan Properti | 178.824 | 8.681 | 626 |
| • Pedagang Kendaraan Bermotor | 130.166 | 8.908 | 275 |
| • Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 15.078 | 3.829 | 13 |
| • Balai Lelang | 5.885 | 1.354 | 91 |
| • Barang Seni/Antik | 4 | 0 | 4 |
| • Tidak terklasifikasi | 62 | 0 | 0 |
| **Total** | **330.019** | **22.772** | **1.009** |

**Grafik 14**

**Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir**

**Ags 2020 s.d Ags 2021**

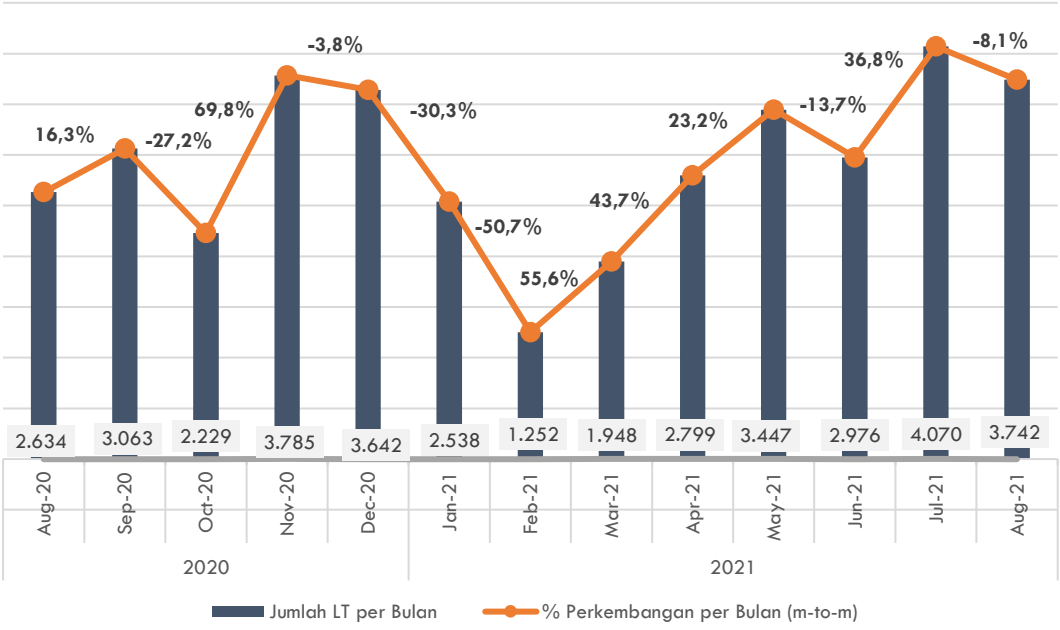

**Grafik 15**
**Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ**
**Dari Mei 2012 s.d Ags 2021**

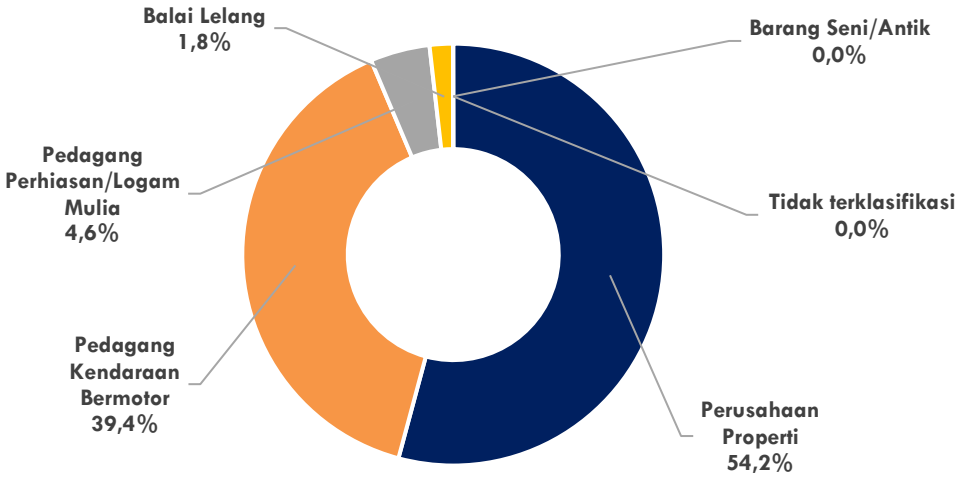


**Grafik 16**
**Distribusi Total Kumulatif PBJ Pelapor**
**Dari Mei Feb 2012 s.d Ags 2021**

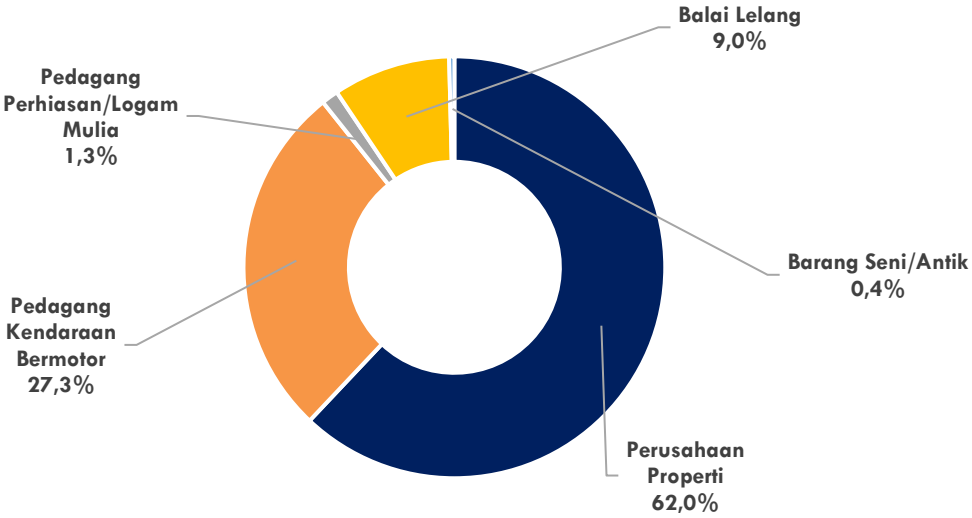

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LTKL

## LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI

### UU TPPU

**Pasal 1 angka 4**

"Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri"

**AGUSTUS 2021**

**INCOMING**

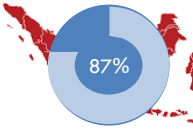


**1.585.698 laporan**

**OUTOING**

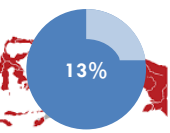


**230.323 laporan**

**Jenis Transaksi**

1. NON-SWIFT
2. SWIFT
3. KUPU

Tercatat **14.191.071** Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar negeri Pada Tahun 2021 **Sampai dengan Agustus 2021**

Tercatat **196.280.698** Laporan Transaksi Dari dan Ke Luar negeri sejak **2014 s.d Agustus 2021**

GOAML
SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG

### Perka PPATK No 1 Tahun 2021

**Pasal 9 ayat (3)** menyatakan "Penyedia Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK merupakan bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank".

**Nilai Rata-Rata Transfer Dana per transaksi setiap laporan selama tahun 2021 (s.d Agustus 2021)**

| NEGARA TUJUAN | | NEGARA ASAL | |
|---|---|---|---|
| CHINA | 55.594 transaksi | MALAYSIA | 777.741 transaksi |
| SINGAPORE | 40.886 transaksi | SINGAPORE | 435.572 transaksi |
| UNITED STATES | 28.472 transaksi | TAIWAN | 431.758 transaksi |

**Tabel 12**

**Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi**

| Jenis Transaksi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Dari Luar Negeri (*Incoming*) | 30.675.231 | 29.204.854 | 2.488.304 | 2.433.436 | 2.272.360 | 2.292.400 | 1.533.590 | 1.414.829 | 1.166.637 | 1.739.011 | 1.690.477 | 1.622.245 | 1.705.937 | 1.540.820 | 1.585.698 |
| SWIFT | 9.307.305 | 5.211.445 | 319.003 | 365.466 | 334.988 | 324.579 | 378.195 | 230.461 | 243.158 | 399.107 | 481.542 | 387.885 | 555.523 | 462.576 | 460.580 |
| NON-SWIFT | 12.431.837 | 14.314.009 | 1.415.933 | 1.418.587 | 1.344.205 | 1.388.925 | 845.677 | 792.817 | 921.265 | 1.337.089 | 1.206.495 | 1.230.902 | 1.148.422 | 1.076.078 | 1.123.202 |
| KUPU | 8.936.089 | 9.679.400 | 753.368 | 649.383 | 593.167 | 578.896 | 309.718 | 391.551 | 2.214 | 2.815 | 2.440 | 3.458 | 1.992 | 2.166 | 1.916 |
| Ke Luar Negeri (*Outgoing*) | 3.255.843 | 3.701.097 | 241.610 | 258.820 | 211.006 | 268.301 | 271.090 | 202.874 | 161.015 | 258.487 | 206.863 | 199.000 | 247.932 | 218.923 | 230.323 |
| SWIFT | 2.694.311 | 2.803.703 | 208.096 | 218.820 | 192.367 | 230.989 | 246.065 | 177.900 | 153.689 | 248.259 | 196.861 | 189.629 | 237.009 | 208.629 | 219.399 |
| NON-SWIFT | 374.336 | 672.076 | 17.874 | 18.818 | 16.879 | 18.969 | 12.762 | 9.867 | 5.580 | 7.826 | 6.950 | 6.800 | 8.228 | 7.336 | 7.233 |
| KUPU | 187.196 | 225.318 | 15.640 | 21.182 | 1.760 | 18.343 | 12.263 | 15.107 | 1.746 | 2.402 | 3.052 | 2.571 | 2.695 | 2.958 | 3.691 |
| Total | 33.931.074 | 32.905.951 | 2.729.914 | 2.692.256 | 2.483.366 | 2.560.701 | 1.804.680 | 1.617.703 | 1.327.652 | 1.997.498 | 1.897.340 | 1.821.245 | 1.953.869 | 1.759.743 | 1.816.021 |

**Tabel 13**

**Total Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dalam Triliun Rupiah**

| Jenis Transaksi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| **Dari Luar Negeri (Incoming)** | **5.371** | **5.268** | **402** | **470** | **374** | **388** | **438** | **312** | **1.663** | **861** | **516** | **2.274** | **576** | **474** | **1.055** |
| SWIFT | 5.252 | 4.906 | 340 | 393 | 315 | 342 | 404 | 262 | 212 | 431 | 471 | 349 | 524 | 430 | 453 |
| NON-SWIFT | 79 | 301 | 58 | 74 | 56 | 44 | 32 | 48 | 1.448 | 96 | 41 | 657 | 49 | 41 | 36 |
| KUPU | 40 | 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 333 | 4 | 1.267 | 3 | 3 | 566 |
| **Ke Luar Negeri (Outgoing)** | **5.337** | **5.046** | **306** | **363** | **325** | **390** | **428** | **295** | **230** | **441** | **416** | **339** | **465** | **390** | **377** |
| SWIFT | 5.322 | 4.890 | 285 | 334 | 303 | 373 | 417 | 282 | 216 | 419 | 384 | 318 | 427 | 365 | 350 |
| NON-SWIFT | 8 | 142 | 20 | 28 | 21 | 16 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 19 | 36 | 24 | 24 |
| KUPU | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| **Total** | **10.708** | **10.314** | **708** | **833** | **699** | **779** | **866** | **607** | **1.893** | **1.302** | **933** | **2.613** | **1.041** | **864** | **1.432** |

**Grafik 17**

**Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir Ags 2020 s.d Ags 2021**

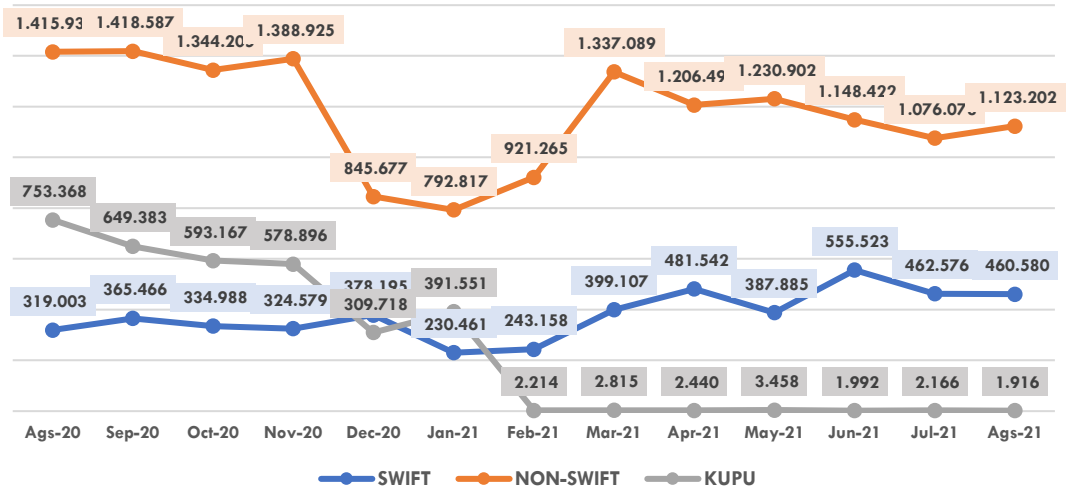


**Grafik 18**

**Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Ke Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir Ags 2020 s.d Ags 2021**

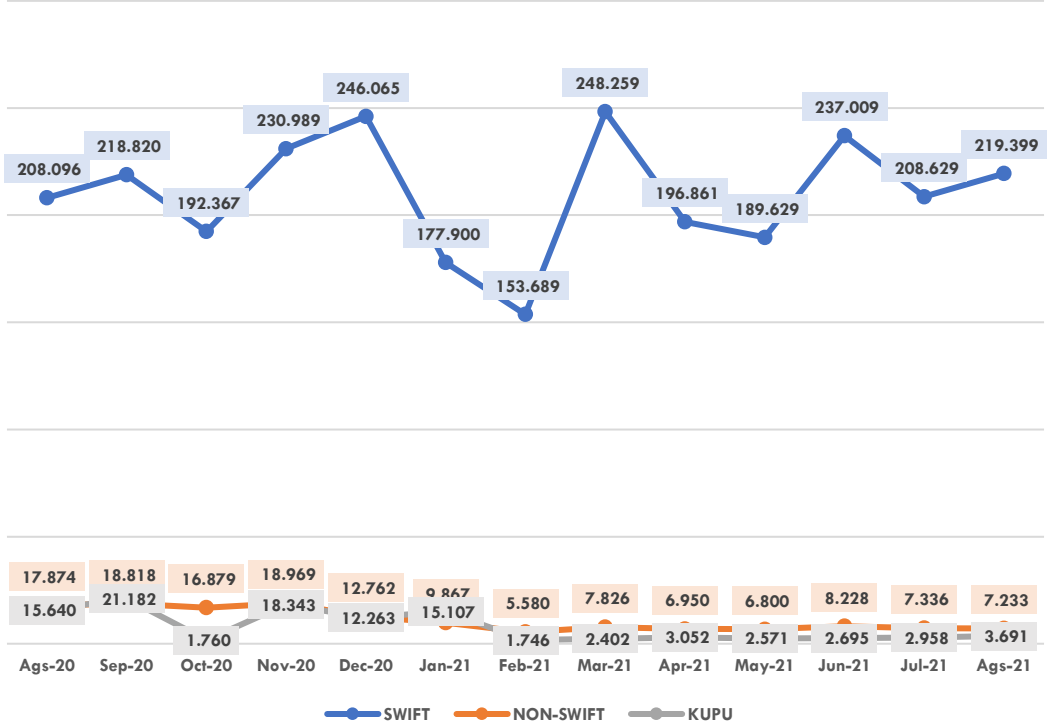

**Tabel 14**
**Daftar 20 Negara Tujuan Transaksi Terbanyak selama Agustus 2021**

| Negara Tujuan | Jumlah Transaksi |
|---|---|
| CHINA | 54.594 |
| SINGAPORE | 40.886 |
| UNITED STATES | 28.472 |
| HONG KONG | 15.711 |
| MALAYSIA | 13.532 |
| AUSTRALIA | 10.799 |
| JAPAN | 9.643 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 9.587 |
| UNITED KINGDOM | 8.124 |
| INDIA | 7.536 |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 6.576 |
| THAILAND | 6.547 |
| UNKNOWN | 6.208 |
| GERMANY | 5.812 |
| PHILIPPINES | 4.500 |
| FRANCE | 3.192 |
| NETHERLANDS | 3.069 |
| CANADA | 2.445 |
| ITALY | 2.104 |
| VIET NAM | 2.056 |

**Tabel 15**
**Daftar 20 Negara Asal Transaksi Terbanyak selama Agustus 2021**

| Negara Asal | Jumlah Transaksi |
|---|---|
| MALAYSIA | 777.741 |
| SINGAPORE | 435.752 |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 431.758 |
| HONG KONG | 420.470 |
| UNITED STATES | 384.942 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 224.139 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 221.869 |
| JAPAN | 213.574 |
| UNITED KINGDOM | 194.433 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 167.462 |
| AUSTRALIA | 144.022 |
| ITALY | 139.593 |
| NETHERLANDS | 105.983 |
| GERMANY | 88.883 |
| SAUDI ARABIA | 86.519 |
| FRANCE | 75.641 |
| BELGIUM | 70.840 |
| CANADA | 70.237 |
| IRELAND | 68.268 |
| NEW ZEALAND | 67.807 |

**Tabel 16**
**Jumlah Pihak Pelapor LTKL Tahun 2021 (s.d Agustus 2021)**

| Pihak Pelapor | Jumlah |
|---|---|
| **Bank** | **75** |
| **Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang** | **78** |
| **Total** | **153** |

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# LPT

## LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI

### UU TPPU

**Pasal 26 ayat (1)**

1. Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
   a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
   b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
   c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

**AGS 2021** — Selama Agustus 2021 terdapat **9 LPT**

**2021 (s.d Ags 2021)** — Selama **Tahun 2021** (s.d Ags 2021) terdapat **78 LPT**

**3.177**

**Sejak Januari 2013 s.d Agustus 2021**

## Penundaan Transaksi 2021 (s.d Agustus 2021)

**Nominal dibawah Rp100 juta**

**69% Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Material tidak terpenuhi**

**Alasan Penundaan: melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana**

**Jenis Terlapor : PERORANGAN (63%)**

**Mayoritas penundaan transaksi dilakukan oleh PJK Bank Swasta 59%**

**PIHAK PELAPOR (2021 (s.d Ags 2021)**

**82% Bank**

**59% Bank Swasta**

**18% Non-Bank - Asuransi**

**Tabel 17**

**Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

| Kelompok Industri | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| **BANK** | **108** | **67** | **8** | **12** | **5** | **3** | **6** | **8** | **14** | **14** | **2** | **9** | **1** | **7** | **9** |
| • Bank Asing | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| • Bank Campuran | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Bank Milik Negara | 50 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| • Bank Pembangunan Daerah | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| • Bank Perkreditan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Bank Swasta | 19 | 40 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| **NON-BANK** | **8** | **12** | **2** | **1** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** | **3** | **5** | **2** | **1** | **0** | **0** |
| • Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga Keuangan Mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Lembaga Pembiayaan Ekspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Manajer Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pasar Modal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pedagang Valuta Asing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pegadaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Efek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Modal Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Wali Amanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pihak Pelapor yang Menyediakan Jasa di Bidang Keuangan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **116** | **79** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Grafik 19**

**Jumlah LPT yang Diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021**

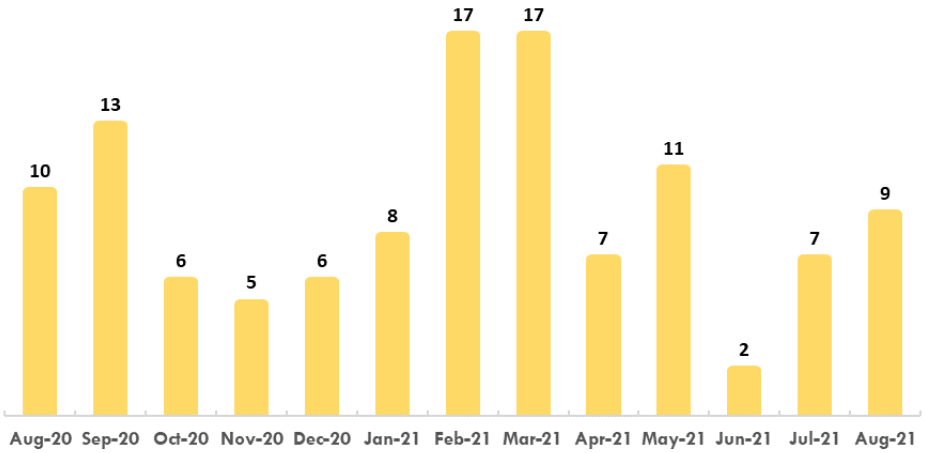


**Tabel 18**

**Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil**

| Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi | 105 | 69 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Total** | **116** | **79** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

*Catatan:*

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

**Tabel 19**

**Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda**

| Kategori Nominal Transaksi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Dibawah 100 juta | 97 | 62 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Diatas Rp1 Milyar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| **Total** | **116** | **79** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

## Tabel 20
## Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

| Jenis Transaksi Yang Ditunda | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Transfer | 50 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tarik/Setor Tunai | 17 | 42 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 |
| Internet Banking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polis Asuransi | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saham | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remittance | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS/Mobile Banking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incoming | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Outgoing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penukaran Valas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redemption penyertaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tidak Terisi | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **116** | **79** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

## Tabel 21
## Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

| Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| **Perorangan** | **111** | **76** | **5** | **13** | **6** | **4** | **4** | **0** | **4** | **13** | **6** | **9** | **2** | **7** | **8** |
| • Pegawai Swasta | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| • Pengusaha/Wiraswasta | 56 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| • Pedagang | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • PNS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| • Ibu Rumah Tangga | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| • Professional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • PEPs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Buruh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| • TKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pelajar/Mahasiswa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| • Pengajar/Dosen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Belum/Tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Tidak Teridentifikasi | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pegawai BUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Korporasi** | **5** | **3** | **5** | **0** | **0** | **1** | **2** | **8** | **13** | **4** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** |
| **Total** | **116** | **79** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

## Tabel 22
## Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

| Alasan Penundaan Transaksi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
| Pertimbangan (1) dan (2) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pertimbangan (1) dan (3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pertimbangan (2) dan (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertimbangan (1) saja | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Pertimbangan (2) saja | 27 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pertimbangan (3) saja | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pertimbangan (1); (2) dan (3) | 42 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| **Total** | **116** | **79** | **0** | **5** | **0** | **5** | **5** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **0** | **17** | **17** |

*Catatan:*

(1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;

(2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;

(3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

Alasan penundaan transaksi pada LPT bulan Januari 2021 dikarenakan permintaan dari PPATK

**Tabel 23**

**Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kantor Pihak Pelapor Penunda Transaksi per Bulan**

| Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumatera Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumatera Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumatera Selatan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kepulauan Riau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kep Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banten | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DKI Jakarta | 63 | 70 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| Jawa Barat | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DI Yogyakarta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Timur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **117** | **80** | **10** | **13** | **6** | **5** | **6** | **8** | **17** | **17** | **7** | **11** | **2** | **7** | **9** |

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# HA

## HASIL ANALISIS

### UU TPPU
**Pasal 44 Ayat 1**

"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik."

HA Proaktif | HA Inquiry

**Pada Agustus 2021**, PPATK telah menyampaikan **39** HA dengan **222** LTKM kepada penyidik yang terdiri dari:

23,1% — **9** HA Proaktif, **64** LTKM

**30** HA Inquiry, **80** LTKM — 76,9%

Tahun 2021 (**s.d. Agustus** 2021), PPATK telah menyampaikan sebanyak **397** HA dengan **1.958** LTKM kepada penyidik yang terdiri dari:

37,0% — **150** HA Proaktif, **801** LTKM

**255** HA Inquiry, **1.157** LTKM — 63,0%

Sejak **Januari 2003 s.d. Agustus 2021**, jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik mencapai **6.176** HA dengan **29.852** LTKM, yang terdiri dari:

44,6% — **2.754** HA Proaktif, **12.147** LTKM

**3.422** HA Inquiry, **17.705** LTKM — 55,4%

HA tahun 2021 (**s.d Agustus 2021**) didominasi **TP Korupsi** sebanyak **99 HA (24,4%)**

PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi.

**2003 s.d. Ags 2021** jumlah IHA yang disampaikan sebanyak **3.378** IHA.

IHA terbanyak disampaikan ke :
- KPK (721 IHA/21,3%)
- DJP (451 IHA/13,4%)

## Tabel 24

### Jumlah HA dan LTKM terkait Per Bulan*)

| Jenis Hasil Analisis | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| **PROAKTIF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Analisis | 164 | 196 | 17 | 6 | 15 | 14 | 31 | 23 | 28 | 18 | 27 | 18 | 20 | 7 | 9 |
| LTKM Terkait | 1.359 | 1.881 | 92 | 173 | 139 | 80 | 142 | 158 | 145 | 224 | 72 | 52 | 55 | 31 | 64 |
| **INQUIRY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Analisis | 334 | 436 | 33 | 23 | 33 | 28 | 50 | 17 | 28 | 55 | 48 | 21 | 40 | 16 | 30 |
| LTKM Terkait | 2.544 | 4.040 | 198 | 517 | 241 | 198 | 225 | 156 | 258 | 260 | 146 | 73 | 110 | 74 | 80 |
| **Total HA** | **498** | **632** | **50** | **29** | **48** | **42** | **81** | **40** | **56** | **73** | **75** | **39** | **60** | **23** | **39** |
| **Total LTKM Terkait** | **3.903** | **5.921** | **290** | **690** | **380** | **278** | **367** | **314** | **403** | **484** | **218** | **125** | **165** | **105** | **222** |

*Catatan*:
*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

## Tabel 25

### Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

| Tujuan Penyampaian HA | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| • Kepolisian saja | 193 | 259 | 19 | 18 | 15 | 22 | 30 | 28 | 32 | 45 | 41 | 18 | 35 | 8 | 19 |
| • Kejaksaan saja | 56 | 52 | 7 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| • KPK saja | 146 | 159 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| • Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kepolisian dan Kejaksaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kepolisian dan KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kejaksaan dan KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Ditjen Pajak | 67 | 113 | 15 | 6 | 4 | 9 | 30 | 5 | 5 | 12 | 25 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| • Ditjen Bea dan Cukai | 9 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| • Badan Narkotika Nasional (BNN) | 27 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| • Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • Database PPATK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **498** | **632** | **50** | **29** | **48** | **42** | **81** | **40** | **56** | **73** | **75** | **39** | **60** | **23** | **39** |

## Tabel 26

### Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian HA

| Instansi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| • Komisi Pemberantasan Korupsi | 59 | 87 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| • Badan Pengawas Pemilu | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Bank Indonesia | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| • Direktorat Jenderal Pajak | 89 | 107 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| • Kementerian Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Badan Pemeriksa Keuangan | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| • Kementerian Keuangan | 12 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| • Kementerian Hukum dan HAM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • KPPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Agama RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| • Tentara Nasional Indonesia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Badan Intelijen Negara | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Perhubungan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| • Badan Pengawasan Obat Makanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • SKK Migas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • BNPT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Badan Pusat Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| • Lainnya | 202 | 229 | 15 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 | 4 |
| **TOTAL** | **506** | **563** | **38** | **3** | **27** | **26** | **53** | **9** | **47** | **20** | **19** | **17** | **32** | **20** | **6** |

## Tabel 27

### Jumlah HA dan LTKM per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

| Tindak Pidana Asal | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| • Cukai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| • Di Bidang Kehutanan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Di Bidang Kelautan dan Perikanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Di Bidang Lingkungan Hidup | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| • Di Bidang Pasar Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Di Bidang Perasuransian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Di Bidang Perbankan | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| • Di Bidang Perpajakan | 67 | 113 | 15 | 6 | 4 | 10 | 30 | 5 | 5 | 12 | 25 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| • Kepabeanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| • Korupsi | 240 | 253 | 15 | 9 | 30 | 11 | 22 | 12 | 13 | 17 | 11 | 14 | 9 | 8 | 15 |
| • Narkotika | 49 | 57 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| • Pemalsuan Uang | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pencatikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Pencurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penggelapan | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penipuan | 65 | 68 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 15 | 16 | 4 | 14 | 3 | 7 |
| • Penyelundupan Migran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelundupan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyelundupan Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyuapan | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| • Perdagangan Orang | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| • Perdagangan Senjata Gelap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| • Perjudian | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Prostitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Psikotropika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Terorisme/Pendanaan Terorisme | 22 | 59 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| • Kepabeanan dan Cukai | 10 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Penyebaran Berita Bohong (ITE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| • Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| • Lain - Lain*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| • Tidak teridentifikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| **Total** | **498** | **632** | **50** | **29** | **48** | **42** | **81** | **40** | **56** | **73** | **75** | **39** | **60** | **23** | **39** |

*Catatan*:

*) Lain – lain: rangkuman dugaan Tindak Pidana selain Tindak Pidana yang tercantum pada tabel

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# KARAKTERISTIK TERLAPOR

## BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

**UU TPPU**
**Pasal 1 Angka 9**

"Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi."

**AGUSTUS 2021**

**9 HA Proaktif**

**2021 (s.d Ags 2021)**

**150 HA Proaktif**

**Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2021 (s.d. Agustus 2021) :**

Mayoritas terlapor HA proaktif adalah **Perorangan (Laki-laki)** sebesar 64,5% atau sebanyak **107** HA.

Berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas **tidak dapat teridentifikasi nominalnya,** yakni sebesar 82,7% atau sebanyak **124** HA. Nominal transaksi yang teridentifikasi mayoritas **di atas 5 milyar rupiah (10,0 %)**

*Catatan*:
*) Grafik hanya menampilkan data kategori nominal transaksi yang teridentifikasi

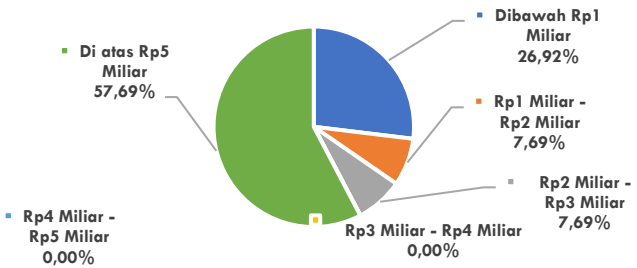


Berdasarkan lokus kejadiannya, sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

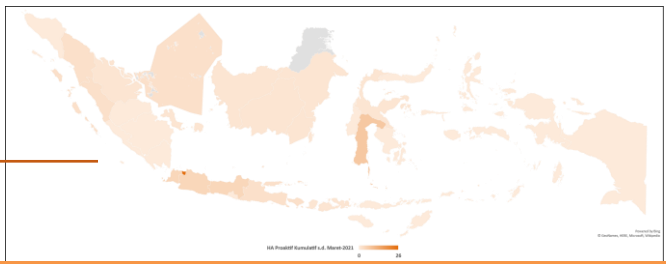

## Tabel 28
## Jumlah HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor*)

| Kategori Terlapor | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| **Perorangan** | **145** | **172** | **11** | **6** | **9** | **11** | **21** | **10** | **21** | **15** | **17** | **16** | **14** | **6** | **8** |
| Laki-Laki | 111 | 140 | 8 | 6 | 8 | 8 | 19 | 9 | 16 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| Perempuan | 34 | 32 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| **Korporasi** | **19** | **24** | **6** | **0** | **6** | **3** | **10** | **13** | **7** | **2** | **10** | **5** | **9** | **11** | **2** |
| **Total** | **164** | **196** | **17** | **6** | **15** | **14** | **31** | **23** | **28** | **17** | **27** | **21** | **23** | **17** | **10** |

*Catatan:*

*) Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada Kategori Terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

## Tabel 29
## Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

| Locus (Tempat Kejadian) | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| Aceh | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sumatera Utara | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sumatera Barat | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sumatera Selatan | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riau | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kepulauan Riau | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lampung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kep Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banten | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DKI Jakarta | 66 | 64 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 14 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| Jawa Barat | 13 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jawa Tengah | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jawa Timur | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DI Yogyakarta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bali | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nusa Tenggara Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maluku | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Barat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Timur | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sulawesi Selatan | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papua | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **164** | **196** | **17** | **6** | **15** | **14** | **31** | **23** | **28** | **18** | **27** | **18** | **20** | **7** | **9** |

*Catatan:*

*) Lain – lain: Wilayah selain 33 provinsi di Indonesia, dapat berupa negara lain.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# HASIL ANALISIS
## PENDANAAN TERORISME

### Pasal 2 Ayat 2

"Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n."

**UU TPPU**

### Pasal 93

"Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sepanjang tahun 2021 (**s.d. Agustus 2021**), terdapat **69** HA yang terkait dengan **dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme**

Sejak **Januari 2003 s.d. Agustus 2021**, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan **dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme** sebanyak **321** HA dengan **1.005** LTKM, yang terdiri dari:

**213** HA Proaktif

**108** HA Inquiry

(sudah termasuk *Inquiry* pada periode Januari 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)

**Tabel 30**

**Data HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor**

| Hasil Analisis | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |
| Proaktif | 22 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Inquiry | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **22** | **59** | **2** | **5** | **2** | **1** | **4** | **14** | **16** | **16** | **11** | **10** | **0** | **2** | **0** |

*Catatan*:

*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

**Grafik 20**

**Perkembangan Jumlah per – Tahun dan Kumulatif HA terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme 2018 s.d Ags 2021**

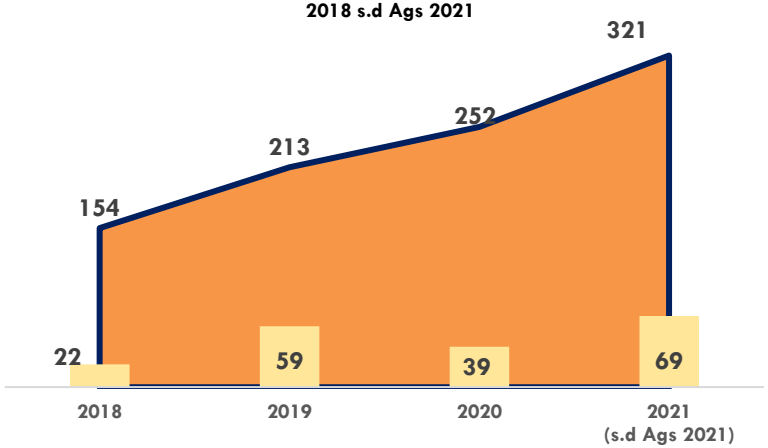


**Tabel 31**

**Jumlah LTKM yang Disampaikan terkait dengan HA dengan dugaan Tindak Pidana Terorisme/Pendanaan Terorisme**

| Jenis Laporan | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| LTKM | 67 | 56 | 19 | 275 | 14 | 4 | 0 | 4 | 6 | 50 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Kumulatif** | **67** | **56** | **44** | **319** | **333** | **337** | **337** | **4** | **10** | **60** | **78** | **120** | **120** | **120** | **120** |

**Grafik 21**

**Perkembangan Jumlah per - Tahun dan Kumulatif LTKM terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme 2018 s.d Ags 2021**

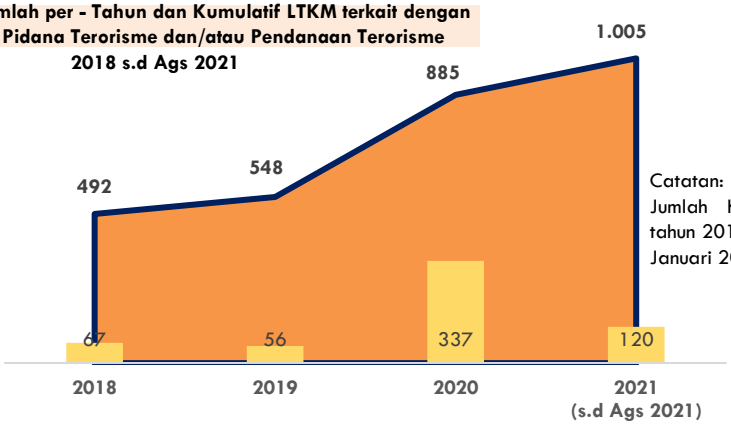


Catatan:
Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# HP

## HASIL PEMERIKSAAN

**UU No 8 Tahun 2010**

**Pasal 1 Angka 8**

**Hasil Pemeriksaan** adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional yang disampaikan kepada penyidik.

**Pasal 90 Ayat (1)**

"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. *financial intelligence unit* negara lain."

**Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2)**

"PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan."

"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."

**2 HP & IHP pada Ags 2021**

**17** HP & IHP 2021 (s.d Ags 2021)

**192** HP&IHP Sejak 2011

| | Sejak 2011 s.d Ags2021 | Ags 2021 |
|---|---|---|
| REKENING | 29.277 | 171 |
| PJK | 2.663 | 22 |

**Penyampaian HP&IHP kepada Penyidik sejak 2011 s.d Ags 2021**

| | |
|---|---|
| KEPOLISIAN | 49 |
| KEJAKSAAN | 41 |
| KPK | 75 |
| BNN | 12 |
| DJP | 19 |
| DJBC | 15 |

**Tabel 32**

**Jumlah Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan*)**

| Penyidik | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Kepolisian | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kejaksaan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **Total** | **7** | **10** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |

**Tabel 33**

**Jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada *Stakeholders* per Bulan*)**

| *Stakeholders* | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| KPK | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJBC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kemendagri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemenkeu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **15** | **14** | **0** | **1** | **1** | **2** | **3** | **0** | **1** | **5** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** |

*Catatan*:

*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Informasi maupun Hasil Pemeriksaan kepada *Stakeholders*

**Tabel 34**

**Jumlah HP, PJK dan Rekening yang Diperiksa**

| Penyampaian | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| HP dan IHP | 22 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Penyedia Jasa Keuangan | 398 | 453 | 0 | 28 | 15 | 126 | 137 | 12 | 11 | 42 | 25 | 28 | 3 | 40 | 22 |
| Rekening | 6.800 | 7.419 | 0 | 99 | 151 | 668 | 359 | 103 | 268 | 761 | 100 | 106 | 30 | 207 | 171 |

**Grafik 22**

**Jumlah HP, PJK, dan Rekening yang Diperiksa**
**2018 s.d Ags 2021**

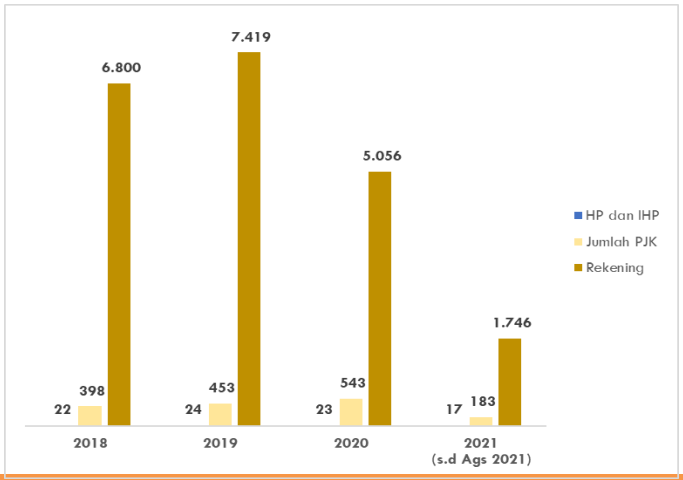

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# PERMINTAAN INFORMASI

## KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HA

**Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c UU Nomor 8 Tahun 2010**

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

**AGS 2021**

**613** Permintaan

**542** BANK | **55** NON-BANK | **16** REGULATOR/INSTANSI lain

**2021** (s.d Ags 2021)

**5.853** Permintaan

**4.505** BANK | **1.311** NON-BANK | **37** REGULATOR/INSTANSI lain

**44.464** Jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada PJK/PBJ/Instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak **Januari 2010 s.d. Agustus 2021**

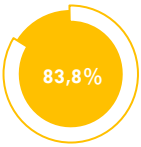


37.084 permintaan
**PJK Bank**

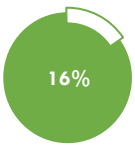


7.244 permintaan
**PJK Non-Bank**

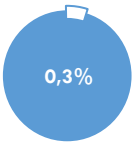


136 permintaan
**Regulator/Instansi Lainnya**

**Tabel 35**

**Jumlah Permintaan Informasi kepada PJK Bank/PJK Non-Bank/Regulator/Instansi**

| Tujuan Permintaan Informasi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Bank | 4.548 | 4.849 | 385 | 220 | 494 | 261 | 352 | 211 | 573 | 371 | 1.183 | 580 | 441 | 604 | 542 |
| Non-Bank | 666 | 948 | 85 | 40 | 94 | 36 | 139 | 119 | 329 | 59 | 384 | 182 | 127 | 56 | 55 |
| Regulator/Instansi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| Total | 5.215 | 5.797 | 471 | 260 | 588 | 297 | 493 | 332 | 902 | 430 | 1.574 | 767 | 569 | 666 | 613 |

**Grafik 23**

**Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi kepada PJK Bank/PJK Non-Bank/Regulator/Instansi 2018 s.d Ags 2021**

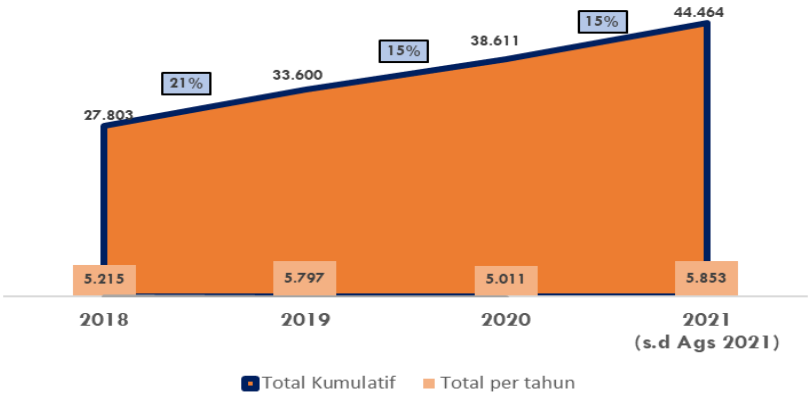


*Catatan*:
*) Total Kumulatif dihitung sejak tahun 2010

**Grafik 24**

**Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada PJK Bank/PJK Non-Bank/Regulator/Instansi 2018 s.d Ags 2021**

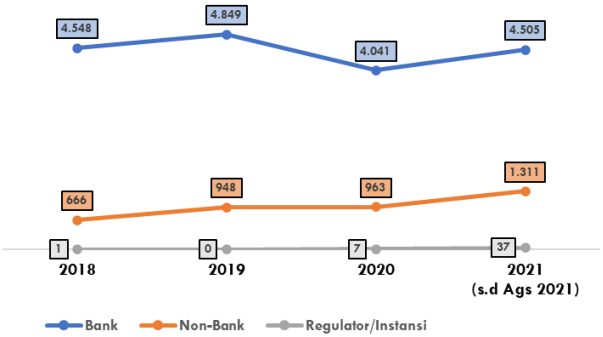

## Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019

"PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang"

**AGUSTUS 2021**

PPATK menerima **4** pengaduan

**2** Individu
**2** Lembaga

**+7** setelah Februari 2021

**Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

PPATK menerima **77** pengaduan

**40** Individu
**37** Lembaga

**Tahun 2013 – 2021 (s.d Ags 2021)**

PPATK menerima **927** pengaduan

**575** Individu
**352** Lembaga

**100%** telah ditindaklanjuti

**Grafik 25**
**Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2013 s.d Ags 2021**

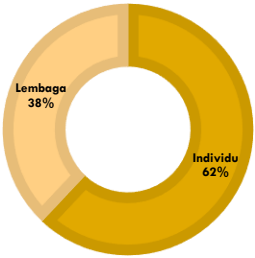


**Tabel 36**
**Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK Tahun 2018 s.d Agustus 2021**

| Jenis Pelapor | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Individu | 30 | 55 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| Lembaga | 40 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| Total | 70 | 84 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 14 | 13 | 18 | 4 | 4 |

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# PUTUSAN PENGADILAN
## TERKAIT TPPU

**UU TPPU**

**Pasal 69**

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

**Pasal 77**

"Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

**Perkara TPPU** yang telah diputus oleh Pengadilan **sejak Januari 2005 s.d. Agustus 2021***)

**632**

**Hukuman maksimal : seumur hidup**
**Denda maksimal : Rp32 Miliar**

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan **tindak pidana asal Narkotika** (170 putusan atau 27%).

Sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah **DKI Jakarta**, yaitu sebanyak **198 putusan (31,3 %)**.

*) Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada *Website* Direktori Putusan Mahkamah Agung

**Tabel 37**

**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Provinsi***

| Propinsi | Kumulatif 2005 s.d. 2021 (s.d.Ags-2021) | % Distribusi |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | 198 | 31,3% |
| Jawa Tengah | 53 | 8,4% |
| Jawa Barat | 57 | 9,0% |
| Sumatera Utara | 40 | 6,3% |
| Jawa Timur | 42 | 6,6% |
| Banten | 18 | 2,8% |
| Kalimantan Barat | 19 | 3,0% |
| Aceh | 25 | 4,0% |
| Sumatera Selatan | 23 | 3,6% |
| Kalimantan Selatan | 15 | 2,4% |
| DI Yogyakarta | 16 | 2,5% |
| Riau | 17 | 2,7% |
| Kepri | 10 | 1,6% |
| Bali | 8 | 1,3% |
| Kalimantan Timur | 12 | 1,9% |
| Jambi | 11 | 1,7% |
| NTB | 6 | 0,9% |
| Sulawesi Selatan | 20 | 3,2% |
| Bengkulu | 4 | 0,6% |
| Papua | 5 | 0,8% |
| Sulawesi Tengah | 3 | 0,5% |
| Kalimantan Tengah | 4 | 0,6% |
| Lampung | 3 | 0,5% |
| Kep. Bangka Belitung | 2 | 0,3% |
| Papua Barat | 3 | 0,5% |
| Sumatera Barat | 9 | 1,4% |
| Sulawesi Barat | 2 | 0,3% |
| Maluku | 3 | 0,5% |
| Maluku Utara | 1 | 0,2% |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 0,2% |
| NTT | 2 | 0,3% |
| **Jumlah** | **632** | **100%** |

**Tabel 38**

**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal***

| Tindak Pidana Asal | Kumulatif 2005 s.d. 2021 (s.d.Ags-2021) | % Distribusi |
|---|---|---|
| Narkotika | 170 | 26,9% |
| Korupsi | 112 | 17,7% |
| Penipuan | 111 | 17,6% |
| Penggelapan | 58 | 9,2% |
| Perbankan | 46 | 7,3% |
| Pemalsuan Surat | 18 | 2,8% |
| Pencurian | 13 | 2,1% |
| Perjudian | 5 | 0,8% |
| Pemerasan | 4 | 0,6% |
| TP Perpajakan | 4 | 0,6% |
| Pemalsuan Uang | 2 | 0,3% |
| Psikotropika | 2 | 0,3% |
| Transfer Dana | 8 | 1,3% |
| Lingkungan Hidup | 3 | 0,5% |
| Penyuapan | 1 | 0,2% |
| Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai | 1 | 0,2% |
| Kehutanan | 1 | 0,2% |
| Kelautan | 1 | 0,2% |
| Perasuransian | 1 | 0,2% |
| Tindak Pidana Lain | 71 | 11,2% |
| **Jumlah** | **632** | **100%** |

*Catatan:*

*) Terdapat *update* data statistik Putusan Pengadilan per tanggal 31 Agustus 2021

**Tabel 39**

**Putusan Pengadilan TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman***

| Putusan Pengadilan/Hukuman | 2005 - 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (s.d Ags 2021) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Putusan Pengadilan** | 342 | 62 | 60 | 85 | 83 | **632** |
| **Hukuman Penjara (dalam tahun)** | | | | | | |
| Minimal | 5 (bulan) | - | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Maksimal | Seumur Hidup | 18 | 17 | 20 | Seumur Hidup | **Seumur Hidup** |
| **Hukuman Denda (Rp)** | | | | | | |
| Minimal | - | - | - | - | - | **-** |
| Maksimal | 32.000.000.000 | - | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | **57.000.000.000** |
| **Total Denda+Uang Pengganti (Rp)** | 93.455.000.000 | - | 9.006.685.000 | 19.837.671.048 | 10.866.761.976.488 | **10.989.061.332.536** |

*Catatan*:

*) Terdapat *update* data statistik Putusan Pengadilan per tanggal 31 Agustus 2021

**Grafik 26**

**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal**

**2005 s.d Ags 2021**

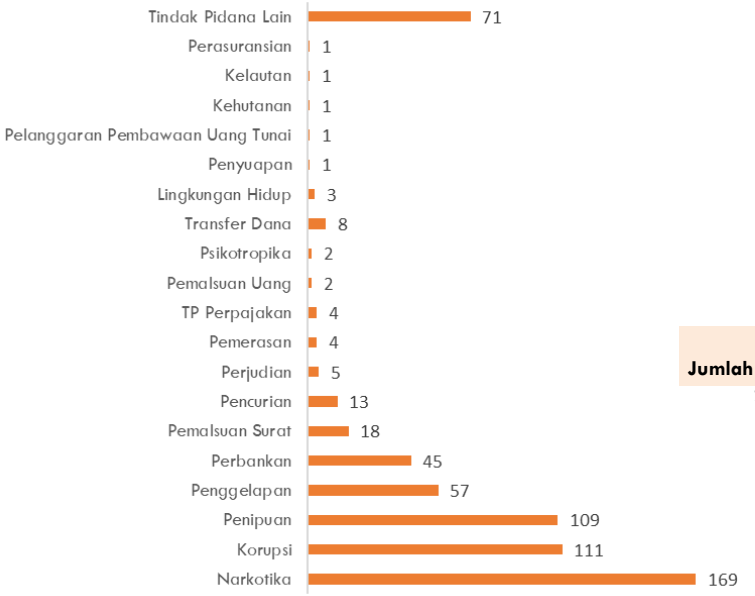


**Grafik 27**

**Jumlah Putusan Pengadilan TPPU**

**2005 s.d Ags 2021**

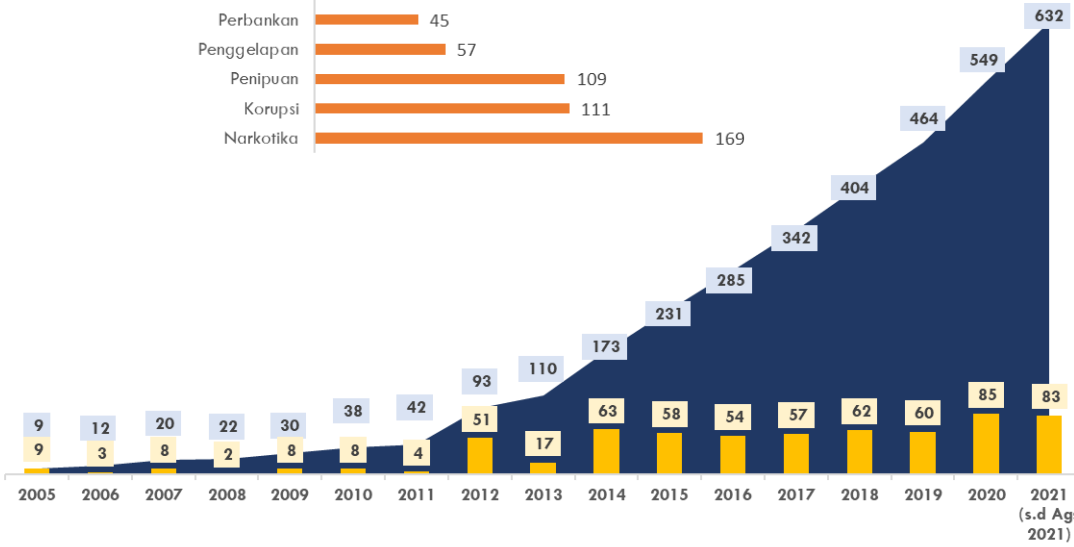

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# PEMENUHAN
# KETERANGAN AHLI

Dalam mendukung proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

## Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK

**15**
**Agustus 2021**

**105**
**Tahun 2021 (s.d Ags 2021)**

**1.618**
**2008 – 2021 (s.d Ags 2021)**

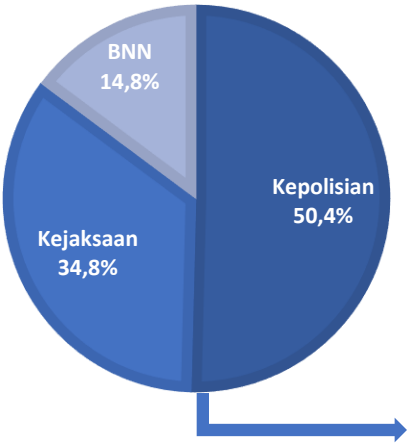


Berdasarkan data tahun **2018 – 2021 (s.d Ags 2021)**, mayoritas permintaan keterangan ahli berasal dari Kepolisian (Bareskrim/POLDA/POLRES)

**Tabel 40**

**Jumlah Keterangan Ahli dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon**

| Penyidik | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| BARESKRIM | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| POLDA & POLRES | 42 | 60 | 0 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Kejaksaan | 12 | 65 | 5 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| KPK | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BNN | 9 | 35 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Komisi Informasi Pusat (KIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadilan Militer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DJBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **81** | **184** | **7** | **21** | **14** | **16** | **28** | **14** | **13** | **17** | **15** | **11** | **15** | **5** | **15** |

**Grafik 28**

**Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon 2018 s.d Agustus 2021**

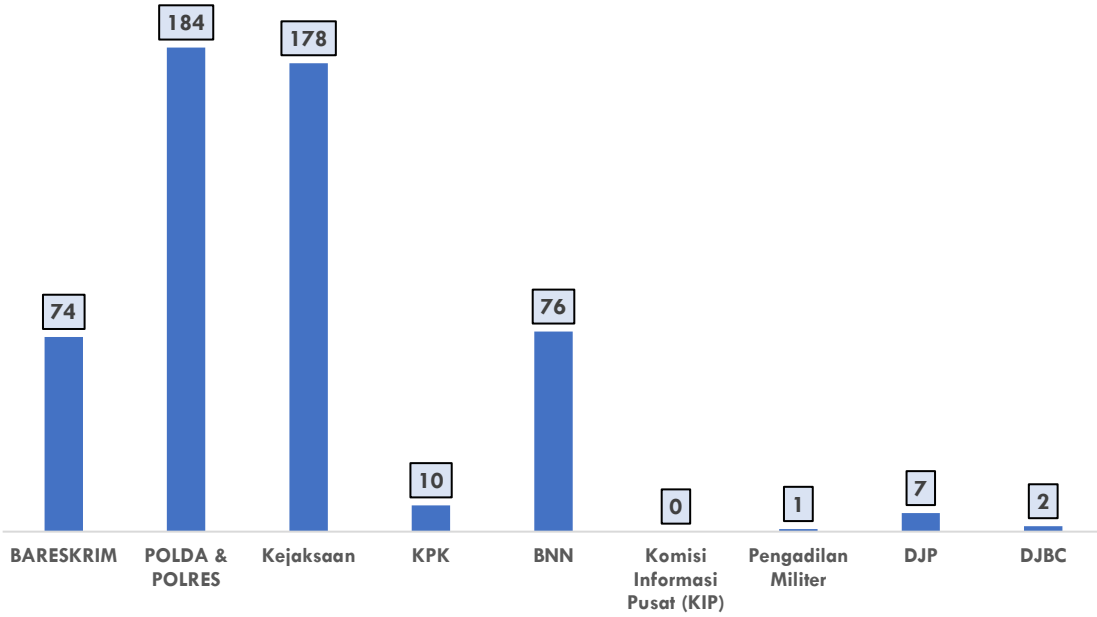

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# AUDIT KEPATUHAN
## TERHADAP PIHAK PELAPOR

### Pasal 43

"Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

**UU TPPU**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan **Audit Kepatuhan dan Audit Khusus** terhadap Pihak Pelapor, baik secara *off-site* maupun secara *on-site* kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

**5** audit **oleh PPATK**

**AGS 2021**

**3** PJK

**2** PBJ

**0** PROFESI

**44** audit **oleh PPATK**

**2021**

**10** PJK

**28** PBJ

**6** PROFESI

Mencakup monitoring secara *onsite* yang dilakukan kepada Pihak Pelapor selama tahun 2021 (s.d Agustus 2021)

**2018 – 2021 (s.d Ags 2021)**

**305** audit **oleh PPATK**

**216** PBJ

**82** PJK

**7** PROFESI

**Akumulasi sejak 2005**

Jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ

**1.409** Audit

**Tabel 41**

**Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

| Jenis Pihak Pelapor*) | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| **Penyedia Jasa Keuangan** | **32** | **23** | **2** | **5** | **1** | **8** | **0** | **0** | **0** | **1** | **3** | **0** | **2** | **1** | **3** |
| Bank | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perusahaan Pembiayaan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perusahaan Efek | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajer Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perposan sebagai penyelenggara jasa giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagang Valuta Asing | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pegadaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kustodian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga keuangan mikro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga pembiayaan ekspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasar Modal**) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan modal ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan pembiayaan infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wali Amanat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Penyedia Barang dan Jasa** | **65** | **75** | **2** | **4** | **4** | **7** | **6** | **0** | **5** | **6** | **6** | **3** | **5** | **1** | **2** |
| Perusahaan Properti | 43 | 44 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Pedagang Kendaraan Bermotor | 20 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagang Perhiasan/Logam Mulia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balai Lelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barang Seni/Antik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tidak terklasifikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Profesi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **4** | **0** | **0** |
| **Total** | **97** | **98** | **4** | **9** | **5** | **15** | **7** | **0** | **5** | **7** | **9** | **5** | **11** | **2** | **5** |

*) Mencakup audit kepatuhan *onsite dan* audit khusus/*join* audit

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

**Grafik 29**
**Perkembangan Jumlah Per Tahun dan Kumulatif Audit Pihak Pelapor**
**2018 s.d Ags 2021**

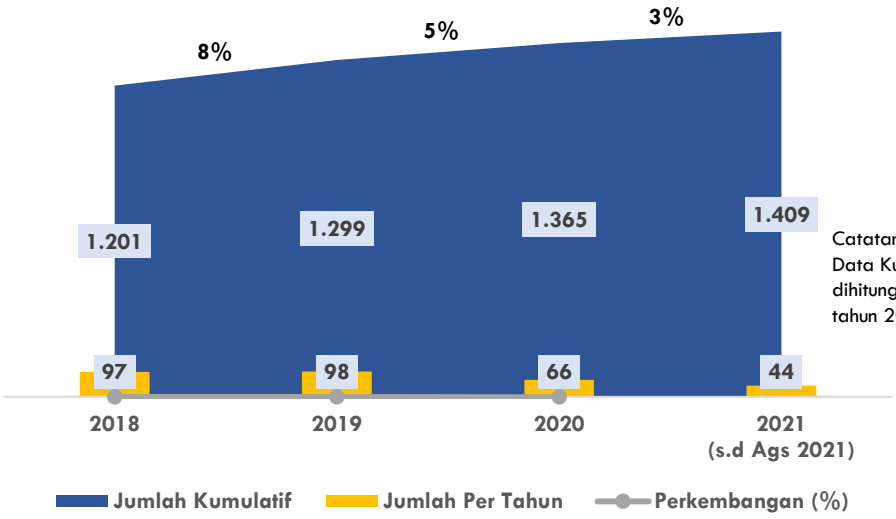


Catatan:
Data Kumulatif dihitung sejak tahun 2005

**Grafik 30**
**Jumlah Pihak Pelapor yang telah di audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**
**2018 s.d Ags 2021**

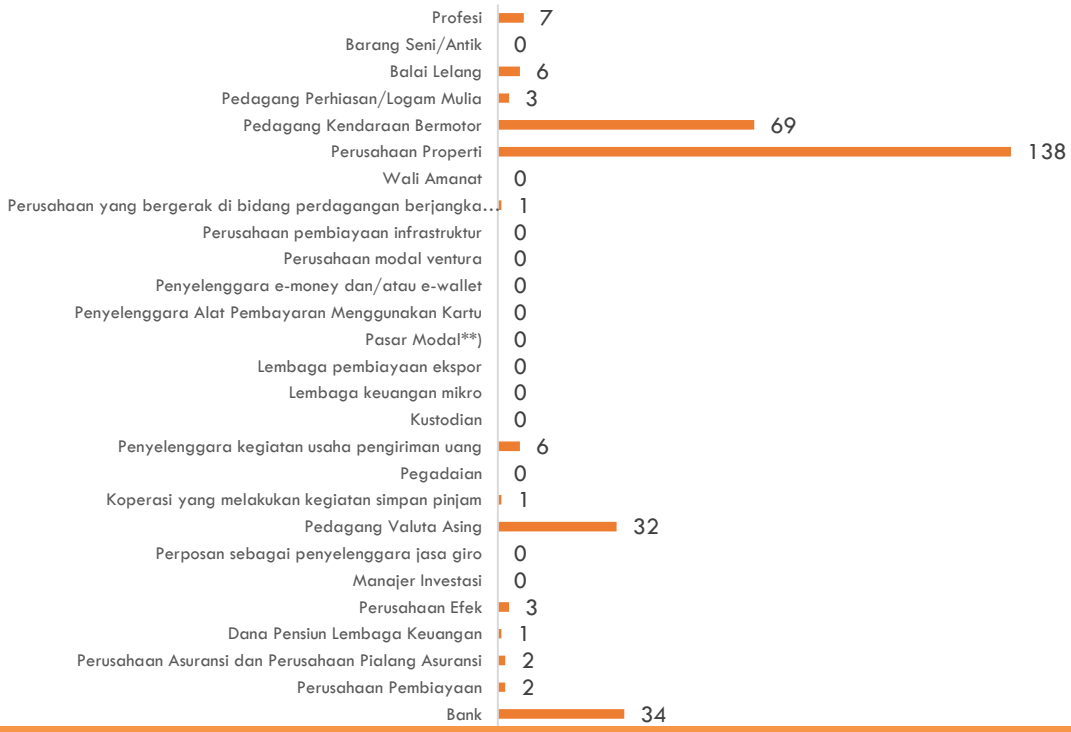

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU

## UU TPPU

### Pasal 88 ayat (1) dan (2)

"Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal."
"Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia."

### Pasal 89 ayat (1) dan (2)

"Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang."
"Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

### Pasal 90 ayat (1)

"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, …."

**10** Pertukaran Informasi

AGS 2021

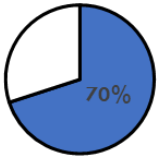


Mayoritas bersifat *Incoming Mutual Request*

**185** Pertukaran Informasi

2021 s.d Agustus 2021

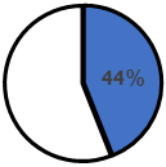


Mayoritas bersifat *Spontanious Outgoing Information*

**2.576** Pertukaran Informasi

2003 – 2021 (s.d Ags 2021)

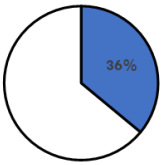


Mayoritas bersifat *Incoming Mutual Request*

**Tabel 42**

**Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi**

| Jenis Pertukaran Informasi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Outgoing Mutual Request (Incoming Information) | 24 | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Incoming Mutual Request (Outgoing Information) | 78 | 104 | 15 | 0 | 10 | 6 | 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Spontaneous Incoming Information | 126 | 124 | 13 | 5 | 2 | 4 | 105 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Spontaneous Outgoing Information | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 56 | 5 | 21 | 15 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| **Total** | **265** | **291** | **31** | **15** | **13** | **18** | **175** | **23** | **40** | **32** | **18** | **11** | **40** | **11** | **10** |

**Keterangan:**

1. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information)* : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.
2. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information)* : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.
3. *Spontaneous Incoming Information* : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).
4. *Spontaneous Outgoing Information* : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.

**Grafik 31**

**Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukarann Informasi 2018 s.d Ags 2021**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

# NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

## Pasal 88

(1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

**UU TPPU**

## Pasal 90 ayat (1)

"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain."

**AGT 2021**

**Tidak ada** penambahan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada **Agustus 2021**

**181** Penandatangan MoU/Nota Kesepahaman oleh PPATK sejak **Januari 2003 s.d Agustus 2021**

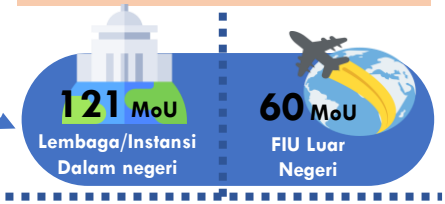


**Grafik 32**
**Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga *)**

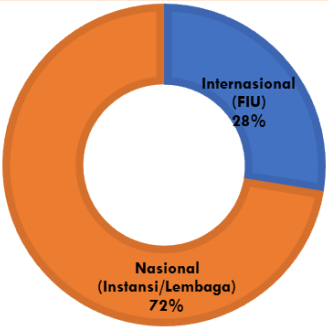


*) Data dihitung dari 2018 s.d Agustus 2021

**Tabel 43**
**Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatanganan Antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga**

| FIU/Instansi | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ags | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags |
| Internasional (FIU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasional (Instansi/Lembaga) | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Total** | **10** | **11** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |

**Tabel 44**

**FIU Negara ASEAN yang telah Memiliki MoU dengan PPATK**

| Negara (FIU) | Penandatanganan Nota Kesepahaman | |
|---|---|---|
| | Tempat | Waktu |
| Thailand | Bangkok | 24 Maret 2003 |
| Malaysia | Malaysia | 31 Juli 2003 |
| Philippines | Brunei Darussalam | 5 Oktober 2004 |
| Vietnam | Jakarta | 18 Agustus 2010 |
| Myanmar | Jakarta | 14 November 2006 |
| Brunei Darussalam | Jakarta | 17 Desember 2008 |
| Singapura | Singapore | 17 September 2013 |
| | Jakarta | 25 September 2013 |
| Kamboja | Jakarta | 22 September 2015 |
| Laos | Bali | 11 Agustus 2016 |

**Tabel 45**

**Lembaga/Instansi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPATK**

| DALAM NEGERI | | |
|---|---|---|
| No | Lembaga/Instansi | Tanggal |
| | **Tahun 2003** | |
| 1 | Bank Indonesia | 5 Februari 2003 |
| 2 | Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) | 20 Oktober 2003 |
| 3 | Ditjen Pajak | 28 Oktober 2003 |
| 4 | Ditjen Lembaga Keuangan (LK) | 28 Oktober 2003 |
| 5 | Ditjen Bea & Cukai | 31 Oktober 2003 |
| | **Tahun 2004** | |
| 6 | Center For International Forestry Research | 16 Januari 2004 |
| 7 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 29 April 2004 |
| 8 | Kepolisian Negara RI | 16 Juni 2004 |
| 9 | Kejaksaan Agung RI | 27 September 2004 |
| | **Tahun 2005** | |
| 10 | Departemen Kehutanan | 28 Maret 2005 |
| | **Tahun 2006** | |
| 11 | Badan Pemeriksa Keuangan | 25 September 2006 |
| | **Tahun 2007** | |
| 12 | Itjen Departemen Keuangan | 12 Januari 2007 |
| 13 | Komisi Yudisial | 1 Februari 2007 |
| 14 | Ditjen Administrasi Hukum Umum | 6 Maret 2007 |
| 15 | Ditjen Imigrasi | 6 Maret 2007 |
| 16 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 19 April 2007 |
| 17 | Badan Narkotika Nasional | 13 Juni 2007 |
| 18 | Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam | 15 Agustus 2007 |
| | **Tahun 2008** | |
| 19 | Universitas Surabaya | 17 April 2008 |
| 20 | STIE Perbanas Surabaya | 31 Juli 2008 |
| 21 | Universitas Gadjah Mada | 17 September 2008 |
| 22 | Badan Pengawas Pemilu | 6 November 2008 |
| 23 | Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 7 November 2008 |

| | | |
|---|---|---|
| **Tahun 2009** | | |
| 24 | Universitas Soedirman | 23 Januari 2009 |
| 25 | Badan Pertanahan Nasional | 17 April 2009 |
| 26 | Universitas Andalas | 18 Mei 2009 |
| 27 | Ditjen Pos dan Telekomunikasi | 12 Juni 2009 |
| 28 | Universitas Hasanuddin | 23 Juni 2009 |
| 29 | Institut Teknologi Bandung | 25 Juni 2009 |
| 30 | Universitas Diponogoro | 12 Agustus 2009 |
| 31 | Lembaga Penjamin Simpanan | 17 November 2009 |
| 32 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 20 November 2009 |
| 33 | Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan | 3 Desember 2009 |
| 34 | Universitas Indonesia | 7 Desember 2009 |
| 35 | Universitas Jember | 7 Desember 2009 |
| **Tahun 2010** | | |
| 36 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 14 April 2010 |
| 37 | Universitas Padjajaran | 22 Juni 2010 |
| 38 | Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik | 7 Juli 2010 |
| 39 | Universitas Mataram | 27 Juli 2010 |
| 40 | Universitas Syiah Kuala | 8 Oktober 2010 |
| 41 | Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) | 29 Desember 2010 |
| **Tahun 2011** | | |
| 42 | Kementerian Perhubungan RI | 27 Januari 2011 |
| 43 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 18 April 2011 |
| 44 | Universitas Pattimura | 5 Mei 2011 |
| 45 | Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI) | 29 Juli 2011 |
| 46 | Ombudsman RI | 11 Agustus 2011 |
| 47 | Universitas Sriwijaya | 12 September 2011 |
| 48 | Universitas Udayana | 4 Oktober 2011 |
| 49 | PT. Pertamina (Persero) | 19 Oktober 2011 |
| 50 | Universitas Bina Nusantara | 19 Oktober 2011 |
| **Tahun 2012** | | |
| 51 | Universitas Esa Unggul | 10 januari 2012 |
| 52 | Universitas Sumatera Utara | 30 Januari 2012 |
| 53 | Universitas Airlangga | 28 Februari 2012 |
| 54 | Itjen Kementerian Pekerjaan Umum | 11 April 2012 |
| 55 | Itjen Kementerian Hukum dan HAM | 23 Oktober 2012 |
| 56 | Universitas Lambung Mangkurat | 5 November 2012 |
| 57 | Universitas Cendrawasih | 29 November 2012 |
| 58 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 3 Desember 2012 |
| 59 | Satgas REDD | 20 Desember 2012 |
| 60 | NCB Interpol Indonesia | 21 Desember 2012 |
| 61 | Itjen Kementerian Agama | 26 Desember 2012 |

| | | |
|---|---|---|
| **Tahun 2013** | | |
| 62 | Setjen Mahkamah Konstitusi | 7 Januari 2013 |
| 63 | LPSE Kementerian Keuangan | 5 Februari 2013 |
| 64 | Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM | 15 Februari 2013 |
| 65 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 18 Juni 2013 |
| 66 | Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) | 21 Juni 2013 |
| 67 | Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI | 30 Juli 2013 |
| 68 | Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati | 27 Agustus 2013 |
| 69 | Itjen Kemendikbud | 30 September 2013 |
| **Tahun 2014** | | |
| 70 | Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil | 30 Januari 2014 |
| 71 | Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP | 4 April 2014 |
| 72 | Komisi Pemilihan Umum | 4 Februari 2014 |
| 73 | Badan Pengawasan Obat Makanan | 26 Mei 2014 |
| 74 | PT. Indonesia Power | 17 Oktober 2014 |
| 75 | PT. PLN (persero) | 19 November 2014 |
| 76 | Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika | 18 Desember 2014 |
| **Tahun 2015** | | |
| 77 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 5 Januari 2015 |
| 78 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 22 Januari 2015 |
| 79 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 12 Maret 2015 |
| 80 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 25 Maret 2015 |
| 81 | PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com) | 17 April 2015 |
| 82 | Kementerian Kesehatan | 30 April 2015 |
| 83 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 12 Mei 2015 |
| 84 | Kementerian PPN/BAPPENAS | 3 Juli 2015 |
| 85 | Lembaga Sandi Negara | 9 November 2015 |
| **Tahun 2016** | | |
| 86 | Kementerian Pertahanan | 14 Maret 2016 |
| 87 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 2 Mei 2016 |
| 88 | UIN Alauddin Makassar | 15 Juli 2016 |
| 89 | Badan Intelijen Negara | 4 Agustus 2016 |
| 90 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 17 Oktober 2016 |
| 91 | Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK | 24 Oktober 2016 |

| | | |
|---|---|---|
| **Tahun 2017** | | |
| 92 | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) | 7 Maret 2017 |
| 93 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | 12 April 2017 |
| 94 | Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) | 2 Mei 2017 |
| 95 | TNI Angkatan Udara | 9 Mei 2017 |
| 96 | Kementerian Perhubungan | 9 Juni 2017 |
| 97 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 6 Juli 2017 |
| 98 | Juknis dengan Ditjen Pajak | 24 Agustus 2017 |
| 99 | Universitas Jayabaya | 26 September 2017 |
| 100 | Universitas Brawijaya | 4 Desember 2017 |
| **Tahun 2018** | | |
| 101 | Satgas Waspada Investasi | 18 Mei 2018 |
| 102 | Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM | 30 Mei 2018 |
| 103 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 3 Oktober 2018 |
| 104 | Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan | 4 Oktober 2018 |
| 105 | Perpustakaan Nasional RI | 12 November 2018 |
| 106 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 15 November 2018 |
| 107 | Universitas Surabaya | 26 November 2018 |
| **Tahun 2019** | | |
| 108 | Satgas Umrah | 8 Februari 2019 |
| 109 | Kementerian BUMN | 14 Februari 2019 |
| 110 | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) | 8 Mei 2019 |
| 111 | Universitas Diponegoro | 27 Mei 2019 |
| 112 | Badan Pusat Statistik | 24 Juni 2019 |
| 113 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 Oktober 2019 |
| **Tahun 2020** | | |
| 114 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 31 Januari 2020 |
| 115 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 13 Februari 2020 |
| 116 | Badan Standarisasi Nasional | 1 Juni 2020 |
| 117 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 01 September 2020 |
| 118 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 08 September 2020 |
| **Tahun 2021** | | |
| 119 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 12 Maret 2021 |
| 120 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) | 22 April 2021 |
| 121 | Komisi Yudisial (KY) | 09 Juni 2021 |

# BULLETIN STATISTIK

## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id